



No. Katalog : 4102002.91

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2010



<http://papuabarat.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT

2010



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

Nomor ISSN : 2089-1660
Nomor Publikasi : 91300.11.02
Katalog BPS : 4102002.91
Ukuran Buku : 16,5 x 21,5 cm
Jumlah Halaman : xx rumawi + 136 halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit :

Bidang IPDS
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh :

BPS Provinsi Papua Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



GUBERNUR PAPUA BARAT SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2010*** oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

Data dan informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat di dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan manusia telah mampu meningkatkan kualitas manusia terutama pada derajat kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang telah berupaya menerbitkan buku ini saya mengucapkan terima kasih dan bagi para perumus kebijakan, arah pembangunan manusia harus lebih mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat
Terima kasih.

Manokwari, Juli 2011
GUBERNUR PAPUA BARAT

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Atururi', written in a cursive style.

ABRAHAM O. ATURURI

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) PROVINSI PAPUA BARAT**

SAMBUTAN

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

Terutama pada pembangunan manusia, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat berusaha menyajikan gambaran tentang sumber daya manusia dan komponen-komponen yang digunakan dalam penyusunan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat untuk memberikan gambaran perkembangan pembangunan manusia yang teraktualisasikan dalam publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010***.

Data dan informasi statistik yang dicakup dalam publikasi ini, dibutuhkan tidak hanya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat, namun juga oleh berbagai konsumen data. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Manokwari, Juli 2011

**Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Papua Barat**
Kepala,


DRS. ISHAK L. HALLATU, M.Si
NIP. 195703241980021002

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010** ini tersaji atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2010.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya, disparitas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Manokwari, Juli 2011

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat
Kepala,**



Ir. Tanda Sirait, MM.
NIP. 19550721 197801 1 002

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat	i
Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xvii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	8
1.3 Manfaat Penulisan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. Metodologi	11
2.1 Sejarah Penghitungan IPM	11
2.2 Sumber Data	12
2.3 Metode Penyusunan Indeks	12
2.4 Besaran Skala IPM	19
III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2010	20
3.1 Kependudukan	20
3.2 Kondisi Kesehatan	28
3.2.1 Sarana Kesehatan	28
3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat	35
3.3 Kondisi Pendidikan	49
3.3.1 Angka Melek Huruf	52
3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah	55
3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah	57
3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	64
3.3.5 Angka Mengulang dan Putus Sekolah	67
3.3.6 Rasio-rasio Pendidikan	71
3.3.7 Tingkat Kelulusan Siswa	74
3.3.8 Fasilitas Pendidikan	76

3.4	Kondisi Perekonomian	80
3.4.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	80
3.4.2	Struktur Ekonomi Regional	82
3.4.3	Pertumbuhan Ekonomi	84
3.4.4	PDRB per Kapita	86
IV	Perkembangan Komponen IPM 2008-2010	89
4.1	Perkembangan Kesehatan	90
4.2	Perkembangan Pendidikan	92
4.2.1	Perkembangan Angka Melek Huruf	94
4.2.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah	96
4.3	Perkembangan Paritas Daya Beli	98
4.4	Perkembangan IPM	102
4.5	Reduksi Shortfall	104
V	Disparitas IPM Antar Wilayah	105
5.1	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	110
5.2	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota secara Nasional	112
5.3	Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran	112
5.3.1	IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	119
5.3.2	IPM Terhadap PDRB per Kapita	123
5.4	Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	123
VI	Penutup	126
	Daftar Pustaka	129
	Lampiran	132

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal.
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM	18
3.1	Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km ² Papua Barat Tahun 2010	24
3.2	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010	31
3.3	Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	32
3.4	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010	34
3.5	Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2009-2010	39
3.6	Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010	41
3.7	Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010	44
3.8	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010	47
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	49
3.10	Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Linnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2010	55
3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2010	60

3.12	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2010	62
3.13	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2008-2010	65
3.14	Jumlah Siswa Mengulang dan Persentase Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	68
3.15	Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	69
3.16	Tabel Rasio-rasio Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	71
3.17	Tingkat Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	75
3.18	Persentase Fasilitas Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	77
3.19	Persentase Fasilitas Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	79
3.20	PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah)	81
3.21	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	83
3.22	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 (Rupiah)	87
4.1	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	91
4.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	93
4.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	95
4.4	Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	97
4.5	IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	99

4.6	Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provisni Papua Barat Tahun 2008-2010	103
5.1	IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	111

<http://papuabarat.bps.go.id>

Daftar Gambar

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia	13
3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2010	21
3.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2010	22
3.3	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2010	25
3.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Dependency Ratio Provinsi Papua Barat Tahun 2010	26
3.5	Jumlah Rumah Sakit yang Telah Beroperasi dan Rasio Penduduk-Rumah Sakit di Papua Barat Tahun 2010	29
3.6	Jumlah Rumah Sakit Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2010	30
3.7	Rata-rata Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Menurut Kelompok Wanita Usia Subur di Provinsi Papua Barat Tahun 2010	37
3.8	Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010	41
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010	46
3.10	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	53
3.11	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	56
3.12	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010	58
3.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2004-2010 (%)	85
5.1	Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010	107

5.2	Dendogram Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010	108
5.3	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2008	113
5.4	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	115
5.5	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010	117
5.6	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2008	120
5.7	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2009	121
5.8	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2010	122

<http://papuabarat.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradigma tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Besaran PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 22.527,36 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 8.685,65 miliar. Sementara pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2010 dengan migas sebesar 26,82 persen terhadap tahun 2009 (*year on year*). Sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa migas pada tahun 2010 'hanya' mencapai 6,83 persen, lebih rendah dari pertumbuhan PDRB dengan migas. Hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2010 kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di sektor Industri pengolahan sebesar 149,52 persen dan sumber pertumbuhan tertinggi pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 18,84 persen.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 256,84 ribu jiwa (35,71 persen) menjadi 256,25 ribu jiwa (34,88 persen).

Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ini terutama terkonsentrasi di daerah perdesaan mencapai 246,66 ribu jiwa (96,26 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan hanya sebesar 9,59 ribu jiwa (3,74 persen) dari total penduduk miskin.

Indikator penting ketenagakerjaan yang sering mendapatkan perhatian adalah terkait isu pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami peningkatan pada Agustus 2010 menjadi 26.341 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2009 sebesar 24.944 orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kondisi Agustus 2010 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2009 yaitu dari 7,56 persen menjadi 7,68 persen.

Kinerja perekonomian yang diukur melalui besaran nilai PDRB agar dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat, maka pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran seberapa besar pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien *gini ratio*. Bila diperbandingkan, diperoleh fakta bahwa *gini ratio* tahun 2007-2010 di Provinsi Papua Barat ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Hal ini dijelaskan oleh nilai koefisien *gini ratio* yang cenderung mengalami peningkatan dari 0,33 di tahun 2007 menjadi 0,37 di tahun 2010. Meskipun di tahun 2009 koefisien *gini ratio* sempat mengalami penurunan menjadi 0,35 persen dari 0,36 persen di tahun 2008, di tahun 2010 *gini ratio* kembali meningkat menjadi 0,37 persen.

Tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen penduduk berpendapatan rendah,

40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapatan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 20 persen berpendapatan teratas. Pada tahun 2010 pada kelompok berpendapatan rendah, distribusi pendapatan yang semestinya diterima 40 persen penduduk ternyata hanya 19,14 persen. Sementara pada kelompok penduduk dengan pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 persen ternyata pada kelompok ini menikmati 43,15 persen dari total pendapatan.

Dampak dari produksi LNG Tangguh yang telah mulai beroperasi pada akhir tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tahun 2010 mencapai 26,82 persen, jauh lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,10 persen. Bahkan bila dibandingkan tanpa memperhitungkan subsektor migas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tetap lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 6,83 persen berbanding 6,56 persen. Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dinilai belum efisien karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Disamping itu koefisien *gini ratio* yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat

ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

- **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

- **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

- **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

- **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat

dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas pilihan-pilihan manusia (*enlarging the choice of the people*). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena

ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2010. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wilayah, data disajikan dari tahun 2008-2010 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2010.
2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-komponen indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2010.
3. Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2010.

1.3. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

- Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.
- Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya.

- Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Bab selanjutnya yakni Bab IV menganalisis perkembangan komponen IPM 2008-2010. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dengan nasional, pembahasan perkembangan IPM dan reduksi *shortfall*.

Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi

dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional dari peringkat capaian IPM kabupaten/kota menurut peringkat provinsi dan nasional. Analisis IPM diperdalam dengan melakukan perbandingan keberhasilan ekonomi dan pembangunan manusia dalam analisis kuadran.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab III dan bab VI sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

<http://papuabarat.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

IPM Provinsi Papua Barat mulai dihitung sejak tahun 2005. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Provinsi Irian Jaya Barat memenuhi kelengkapan syarat sebuah pemerintahan provinsi paska pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menetapkan Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dilantik pada tanggal 26 Juli 2006. Publikasi IPM ini mengawali penerbitan rutin buku IPM Provinsi Papua Barat.

2.2 Sumber Data

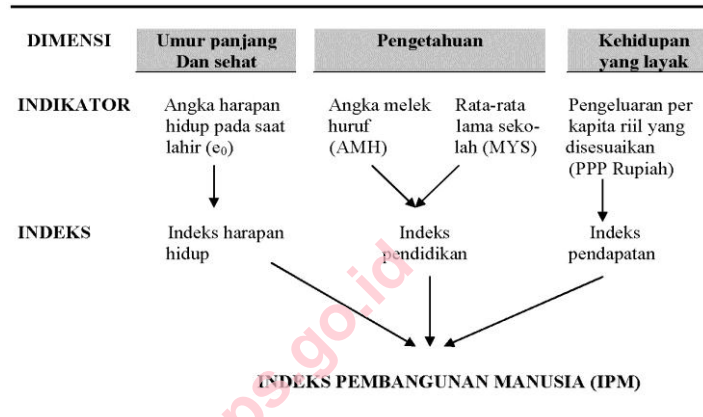
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

- ✚ Susenas Kor: digunakan untuk menghitung indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan penghitungan pengeluaran per kapita.
- ✚ Susenas Modul Konsumsi: digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada 27 komoditas.
- ✚ Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2010: digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan manusia pada kurun waktu 2008 – 2010.
- ✚ PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010: digunakan untuk melihat PDRB kabupaten/kota, PDRB Provinsi Papua Barat, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita sebagai gambaran pembangunan perkenomian.

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang telah disesuaikan. Penjelasan rinci metode penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut:

Gambar 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia



Angka harapan hidup pada saat lahir

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah:

- Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.
- Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada huruf a di atas.
- Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program *MORTPACK* sub program CEBCS.

- d. Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.
- e. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun 2008 - 2010 dilakukan dengan ekstrapolasi.



Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan angka melek huruf adalah:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- c. Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.



Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.

- b. Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah.
- c. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi *mean*. Untuk menghitungnya dapat menggunakan paket Program SPSS.



Paritas Daya Beli yang Disesuaikan

Langkah-langkah menghitung paritas daya beli adalah:

- a. Menghitung pengeluaran per kapita, y .
- b. Menghitung pengeluaran per kapita yang dimark up 20 persen,
 $y_1 = y \times (1,20)$.
- c. Menghitung pengeluaran riil, y_2 dengan membagi y_1 dengan indeks harga konsumen.
- d. Menghitung paritas daya beli dari 27 komoditi dengan persamaan:

$$PPP \text{ per unit} = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{ij}}{\sum_{j=1}^{27} (P_{11,j}^* \cdot Q_{i,j})}$$

PPP = paritas daya beli,

E_{ij} = Pengeluaran komoditas ke $-j$ di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat,

$P_{9,j}$ = Harga komoditas ke $-j$ di Jakarta Selatan,

$Q_{i,j}$ = volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat.

Khusus komoditi rumah sewa, unit kualitasnya ditentukan berdasarkan indeks kualitas rumah. Indeks kualitas rumah dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas rumah tinggal dari delapan variabel. Kedelapan variabel ini diberi skor berdasarkan karakteristik yang sesuai (lihat lampiran 3).

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), berdinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah $4/8 = 0,50$. Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah tangga tersebut adalah 0,50 unit.

- e. Menghitung $y_3 = y_2/PPP$.
- f. Mengurangi y_3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:

Formula Atkinson

$$C_{(i)}^* = \begin{cases} C_{(i)} & \text{jika } C_{(i)} < Z \\ Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} & \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{cases}$$

Dengan:

$C_{(i)}$ = PPP dari pengeluaran riil per kapita, y_3 .

Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis kemiskinan.



Menghitung IPM

- a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

Dengan:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{ij} - X_{(1-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke- i dari kabupaten ke- j ;

$X_{(i-min)}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-maks)}$ = Nilai maksimum dari X_i

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>Combined Gross Enrollment Ratio</i>
Daya Beli	732.720 ^a	300.000 360.000 ^b	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

b. Menghitung indeks pengetahuan :

$$X_2 = \frac{2}{3}(X_{21}) + \frac{1}{3}(X_{22})$$

Dengan:

X_{21} = Indeks Melek Huruf

X_{22} = Indeks Lama Sekolah

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{(i)}$$

Dengan Indeks $X_{(i)}$ = Indeks komponen IPM ke i ;

$i = 1$ (Indeks angka harapan hidup),

2 (Indeks pendidikan),

3 (Indeks daya beli).

- Menghitung Reduksi *Shortfall* (r) : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{100 - IPM_t} \right]^{1/n}$$

Dengan:

- r = reduksi *shortfall*,
- IPM_{t+n} = IPM pada tahun ($t + n$)
- IPM_t = IPM pada tahun (t)

2.4 Besaran Skala IPM

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah (UNDP, 2009):

- IPM Sangat Tinggi apabila IPM sama dengan 90,00 atau lebih
- IPM Tinggi apabila IPM antara 80,00 – 89,99
- IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79,99
- IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,00

BAB III

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2010

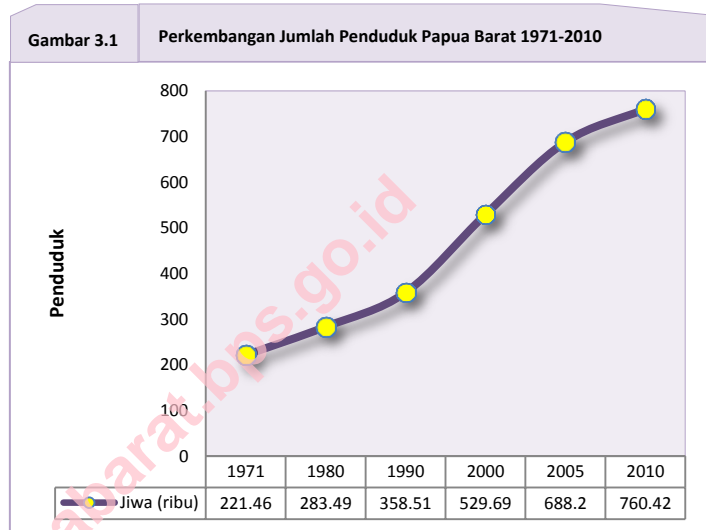
3.1 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

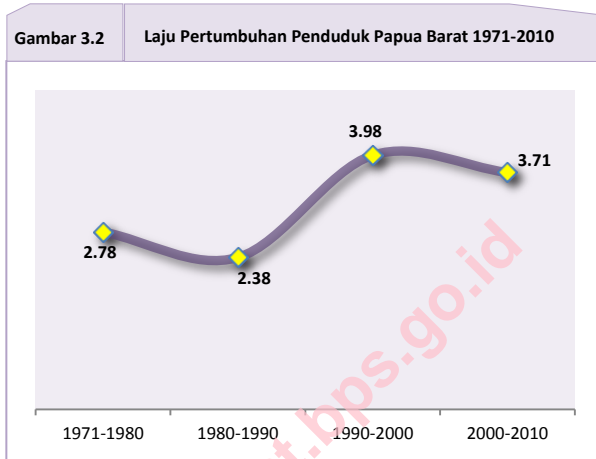
Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk

yang cepat. Sebagai provinsi yang tergolong baru di Indonesia, Papua Barat adalah salah satu dari 33 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.



Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 mencapai 760.422 jiwa. Dibandingkan dengan pada waktu pertama kali diadakan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat yang saat itu masih menjadi bagian wilayah dari Provinsi Papua berjumlah 221,4 ribu jiwa. perubahan penduduk yang relatif cepat terjadi antara tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005. Penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan hingga mencapai 529,69 ribu jiwa pada kondisi Sensus Penduduk tahun 2000. Pada saat pendataan SUPAS 2005 penduduk Papua Barat telah mencapai 688,2 ribu jiwa, kemudian

berdasarkan hasil final Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Papua Barat menjadi 760.422 jiwa.



Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun Papua Barat berada pada kisaran 2-4 persen. Selama tahun 1971-2010, Papua Barat mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,21 persen. Sementara pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antar Sensus Penduduk 1971-1980, 1980-1990, 1990-2000, dan 2000-2010 sebesar 2,78 persen; 2,38 persen; 3,98 persen dan 3,71 persen. Pertumbuhan penduduk mulai mengalami kecenderungan melambat setelah tahun 2000. Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk tahun 2000 hingga kondisi tahun 2010 sebesar 3,71 persen. Pertumbuhan penduduk ini adalah yang tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini terjadi mengingat Papua Barat adalah sebuah provinsi yang tergolong muda dan sedang membangun. Diperkirakan masih tingginya angka pertumbuhan penduduk

ini berasal dari faktor migrasi. Namun pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor migrasi saja tetapi juga faktor fertilitas dan mortalitas. Dengan semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini berangsur-angsur mulai mengalami penurunan seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas.

Meskipun pertumbuhan penduduk tergolong cepat, namun Provinsi Papua Barat memiliki sebaran penduduk yang tidak merata dilihat dari luas wilayah. Jumlah penduduk terbesar adalah Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 190.625 jiwa dan 187.726 jiwa atau sekitar 25,07 dan 24,69 persen dari total penduduk Provinsi Papua Barat. Atau dengan kata lain, jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut hampir setengah dari penduduk Papua Barat. Sementara jumlah penduduk paling kecil adalah Kabupaten Tambrau sebesar 6.144 jiwa atau hanya 0,81 persen dari total penduduk Papua Barat.

Menurut luas wilayah, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Papua Barat, yaitu 20.840,83 Km², namun kepadatan penduduknya hanya 2,52 jiwa/Km², demikian pula dengan Kabupaten Kaimana, luas wilayahnya terbesar kedua di Papua Barat, namun kepadatan penduduknya hanya 2,85 jiwa per Km². Sementara Kota Sorong yang luas wilayahnya paling kecil diantara kabupaten lainnya justru memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 290,30 penduduk/Km². Padatnya penduduk Kota Sorong tak lepas dari motif ekonomi yang menjadi daya tariknya. Kota Sorong adalah pintu gerbang bagi wilayah lainnya di Papua Barat. Perusahaan minyak yang telah didirikan pada zaman Pemerintahan Belanda membuat daerah ini lebih maju dan menjadi awal daya tarik dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berbeda dengan Kota Sorong, Kabupaten Manokwari adalah kota tua yang awalnya sulit untuk berkembang. Namun setelah Provinsi Papua Barat menjadi daerah otonom, dimekarkan dari provinsi induknya, Provinsi Papua, dan dijadikannya Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi, wilayah ini menjadi daerah 'baru' yang mulai ramai. Sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari mulai menata diri dan berkembang menjadi daerah ramai dan padat penduduk.

Secara agregat Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah 97.024,27 Km² dan jumlah penduduk 760.422 jiwa termasuk sebagai provinsi yang kepadatan penduduknya rendah, yakni hanya 7,84 jiwa/Km². Besaran tersebut mempunyai makna rata-rata hanya terdapat 8 orang penduduk dalam setiap Km².

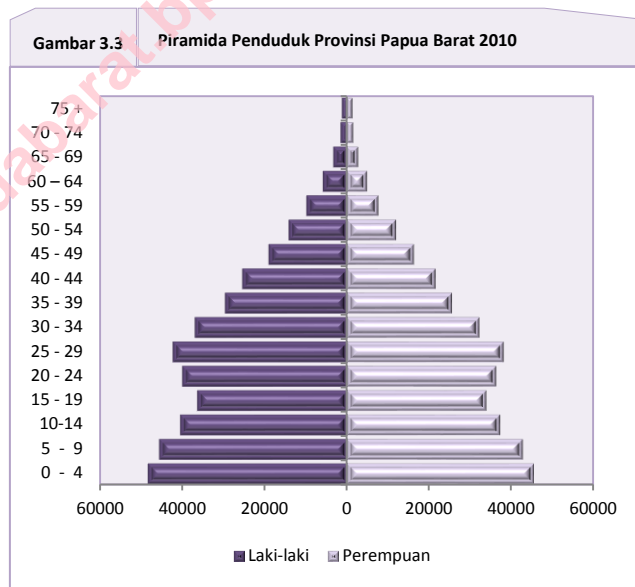
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km² Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk **)	Persentase Jumlah Penduduk	Luas Wilayah *)	Kepadatan Penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	66 828	8,79	11 036,48	6,06
Kaimana	46 249	6,08	16 241,84	2,85
Teluk Wondama	26 321	3,46	3 959,53	6,65
Teluk Bintuni	52 422	6,89	20 840,83	2,52
Manokwari	187 726	24,69	14 250,94	13,17
Sorong Selatan	37 900	4,98	3 946,94	9,60
Sorong	70 619	9,29	7 415,29	9,52
Raja Ampat	42 507	5,59	8 034,44	5,29
Tambrau	6 144	0,81	5 179,65	1,19
Maybrat	33 081	4,35	5 461,69	6,06
Kota Sorong	190 625	25,07	656,64	290,30
Papua Barat	760 422	100,0	97 024,27	7,84

Sumber: *) Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008

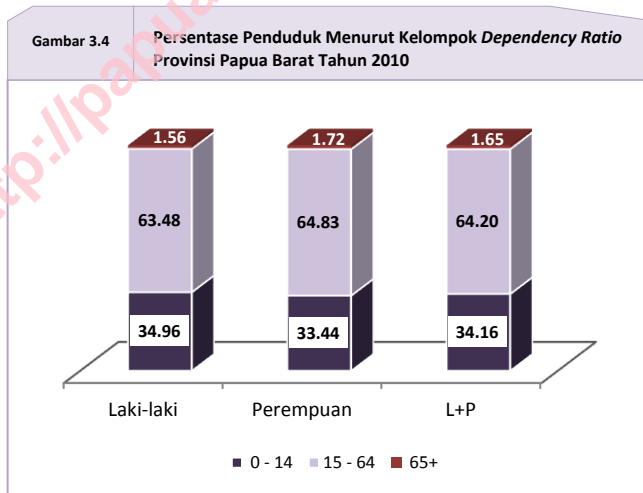
**) Sensus Penduduk Papua Barat 2010

Struktur penduduk Provinsi Papua Barat dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur. Dalam Gambar 3.3, piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut Provinsi Papua Barat termasuk sebagai struktur penduduk muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana penduduk lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur muda atau terjadi pelebaran pada alas piramida penduduk. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat tergolong pada penduduk usia muda karena memiliki median umur 18,60 tahun. Sedangkan kriteria penduduk usia muda adalah bila median umur di suatu daerah ≤ 20 tahun.



Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja

(*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut, maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga dan melakukan kegiatan lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.



Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Demikian pula sebaliknya.

Menurut para ahli demografi, sekitar tahun 2020-2030 nanti Indonesia akan mengalami Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah sebuah kondisi dimana rasio ketergantungan mencapai nilai terendah dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain jumlah penduduk usia produktif berada pada jumlah yang paling maksimum. Bagaimana dengan Papua Barat?. Bila dilihat dari struktur umurnya dalam piramida penduduk, maka kesempatan itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun kedepan, asalkan angka kelahiran mampu ditekan serendah mungkin. Namun perlu diperhatikan bahwa bonus demografi seperti pedang bermata dua, antara berkah dan musibah.

Gambar 3.4 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Papua Barat mencapai 55,77 persen. Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

3.2 Kondisi Kesehatan

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi. Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

3.2.1 Sarana Kesehatan

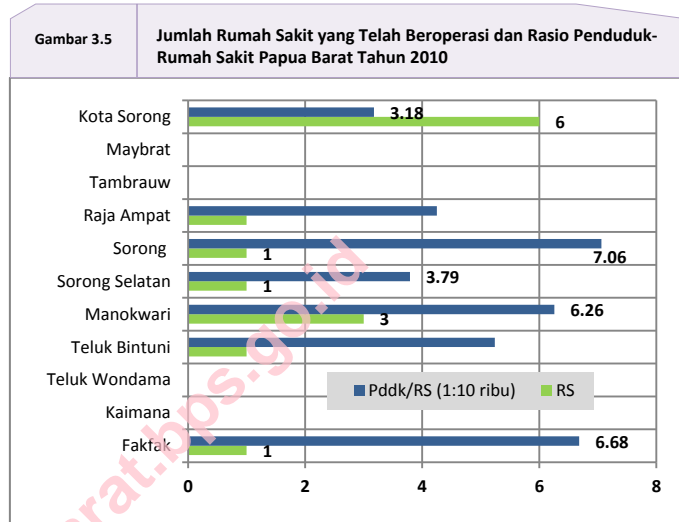
a. Fasilitas Kesehatan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio fasilitas kesehatan per penduduk. Fasilitas kesehatan yang dievaluasi antara lain rumah sakit, puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskedes.

▪ Rumah Sakit

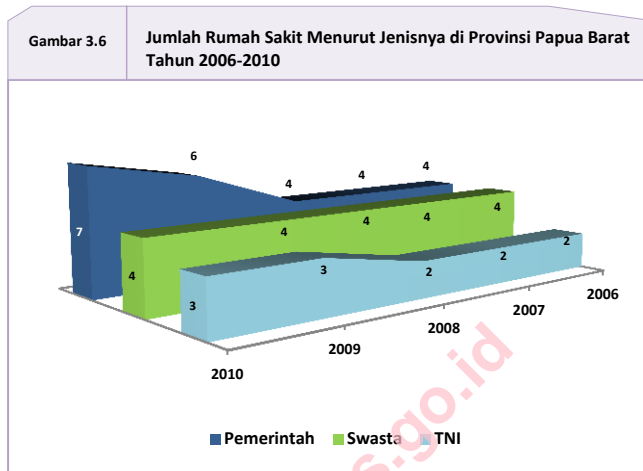
Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai macam pelayanan kesehatan. Distribusi penyebaran rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Papua Barat. Berdasarkan Gambar 3.5, ditunjukkan bahwa dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, belum semua kabupaten memiliki fasilitas rumah sakit,

seperti di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit)

Jika diamati dari jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa 14 rumah sakit di Provinsi Papua Barat melayani 760.422 penduduk. Hal ini juga berarti bahwa satu rumah sakit melayani sekitar 54.316 penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2010, ketersediaan rumah sakit milik pemerintah mengalami peningkatan jumlah dari 4 unit rumah sakit di tahun 2006 menjadi 7 unit rumah sakit, sedangkan rumah sakit TNI mengalami penambahan dari 2 unit pada tahun 2006 menjadi 3 unit rumah sakit di tahun 2010. Rumah sakit swasta dari tahun 2006 hingga 2010 tidak mengalami perubahan dalam segi kuantitas. (Lihat Gambar 3.6).



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2010

▪ Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes

Selain rumah sakit, sarana kesehatan lainnya yang ikut berperan dalam menyehatkan masyarakat antara lain puskesmas, pustu, puskesmas keliling, dan polindes yang dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan yang terjangkau baik dalam segi biaya maupun letaknya yang menyebar jika dibandingkan dengan rumah sakit. Puskesmas di Provinsi Papua Barat terdistribusi paling banyak di Kabupaten Manokwari, yaitu 19 puskesmas, sedangkan yang paling sedikit adalah kota Sorong, yaitu 5 buah puskesmas.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang paling banyak ada di Kabupaten Manokwari dibandingkan dengan daerah lain, yaitu terdapat 22 puskesmas, 84 Puskesmas Pembantu, 19 puskesmas keliling, dan 74 unit Poliklinik Desa (Polindes). Mengingat Kabupaten Manokwari dan kabupaten lainnya di Papua Barat memiliki kondisi

geografis yang relatif sulit dengan infrastruktur angkutan darat yang belum seluruhnya terhubung dengan baik, serta biaya transportasi yang mahal, maka salah satu pilihan yang tepat adalah melengkapi sarana-sarana dan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang mudah dijangkau oleh penduduk yang tinggal di daerah terpencil sekalipun.

Tabel 3.2 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Polindes di Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fak-Fak	9	37	9	50
Kaimana	7	46	10	46
Teluk Wondama	6	22	21	18
Teluk Bintuni	15	28	10	19
Manokwari	22	84	19	74
Sorong Selatan	13	38	26	37
Sorong	12	49	17	36
Raja Ampat	15	35	21	16
Tambrauw	6	2
Maybrat
Kota Sorong	5	26	12	1
Papua Barat	110	367	145	297

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2010

Lain halnya dengan Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, sebagai kota besar di Provinsi Papua Barat hanya memiliki 5 Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu, dan 6 Polindes. Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Sorong memiliki penduduk sebanyak 190.625 penduduk di tahun 2010 yang tidak jauh beda dengan Kabupaten Manokwari yang berjumlah 187.726 jiwa. Sedikitnya fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes tidak terlalu bermasalah, hal ini dikarenakan Kota Sorong memiliki rumah

sakit dalam jumlah yang memadai sebagai sarana kesehatan yang dipilih oleh masyarakat untuk berobat. Disamping itu kondisi wilayah yang terkonsentrasi membuat penduduk akan dengan mudah menemukan tempat-tempat pelayanan kesehatan baik berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu maupun polindes.

b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga medis di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010**

Kabupaten/Kota	Dokter			Jumlah
	Ahli	Umum	Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	2	24	3	29
Kaimana	1	14	-	15
Teluk Wondama	-	16	-	16
Teluk Bintuni	1	21	2	24
Manokwari	7	32	7	46
Sorong Selatan	-	15	1	16
Sorong	4	5	-	9
Raja Ampat	-	12	1	13
Tambrauw
Maybrat
Kota Sorong	7	10	3	20
Papua Barat 2010	22	149	19	188
2009	21	108	19	148

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2010

Berdasarkan Tabel 3.3, sebaran tenaga dokter yang tidak memadai di Provinsi Papua Barat, terutama di kabupaten pemekaran. Diketahui bahwa jumlah dokter yang paling banyak ada di Kabupaten Manokwari.

Manokwari sebagai ibukota Provinsi hanya memiliki tenaga dokter sebanyak 46 orang dengan rincian 7 dokter ahli, 32 dokter umum, dan 7 dokter gigi. Sementara jumlah dokter di kabupaten pemekaran rata-rata kurang dari 20 orang per kabupaten. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Disamping itu, dokter dan tenaga kesehatan lainnya cenderung lebih terkonsentrasi di ibukota kabupaten, untuk wilayah-wilayah terpencil banyak ditemui terdapat fasilitas kesehatan tetapi tidak ada tenaga kesehatan yang *standby* disana. Selain itu, masih terdapat kecenderungan distribusi dokter teralokasi di 'kabupaten/kota tua' yang telah ramai dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sebagai contoh adalah Kabupaten Fakfak, Manokwari, Teluk Bintuni dan Kota Sorong memiliki tenaga dokter yang terbanyak, masing-masing memiliki 29, 46, 24, dan 20 orang dokter. Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat jumlah dokter tersebut termasuk dokter dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), mereka hanya memiliki masa bakti hanya sekitar 6 bulan, selebihnya setelah masa bakti berakhir mereka dapat kembali ke daerahnya masing-masing, kecuali jika diperpanjang masa PTT-nya.

Jumlah dokter dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat pelayanan kesehatan. Rasio antara jumlah dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan haruslah proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap dokter maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter. Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2010 dan jumlah dokter yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap

jumlah dokter di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 4.045, dengan kata lain satu dokter rata-rata melayani sekitar 4.045 orang.

Tabel 3.4 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter *)	Rasio Penduduk / Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	66 828	29	2 304
Kaimana	46 249	15	3 083
Teluk Wondama	26 321	16	1 645
Teluk Bintuni	52 422	24	2 184
Manokwari	187 726	46	4 081
Sorong Selatan	37 900	16	2 369
Sorong	70 619	9	7 847
Raja Ampat	42 507	13	3 270
Tambrau	6 144
Maybrat	33 081
Kota Sorong	190 625	20	9 531
Papua Barat 2010	760 422	188	4 045
Papua Barat 2009	743.860	148	5 026

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (*)

Faktanya, jumlah dokter di Provinsi Papua Barat tahun 2010 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, distribusinya pun telah tersebar dengan alokasi yang lebih baik. Rasio penduduk terhadap jumlah dokter tahun 2010 menurun menjadi 4.045 dibandingkan dengan 5.026 ditahun 2009. Artinya terjadi *coverage* yang lebih baik dalam hal tertanganinya penduduk dengan peningkatan jumlah dokter meskipun jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Asumsi tertanganinya penduduk oleh dokter adalah semua penduduk memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan pengobatan dari tenaga dokter

tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut berada pada wilayah yang sulit, kemampuan ekonomi yang rendah atau faktor-faktor lain yang menghambat seseorang untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Meskipun faktanya masih banyak penduduk Papua Barat yang hidup di wilayah terpencil dimana tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan, setidaknya memberikan gambaran kasar bahwa ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat mencerminkan bagaimana kondisi kecukupan tenaga kesehatan di Papua Barat. Rasio penduduk terhadap dokter tertinggi berada di Kota Sorong, dimana seorang dokter harus melayani sekitar 9.531 penduduk. Besarnya rasio tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Teluk Wondama yang memiliki rasio terkecil yaitu sebesar 1.645 penduduk per seorang dokter. *Coverage* tanggungan seorang dokter di Kota Sorong memang besar, namun secara geografis Kota Sorong adalah wilayah padat dimana tempat pelayanan kesehatan cukup terjangkau. Sedangkan Kabupaten Teluk Wondama yang memiliki rasio penduduk terhadap dokter terbaik justru memiliki wilayah terpencil yang cukup banyak dimana tidak seluruh dari wilayah tersebut dialokasikan tenaga dokter. Dampaknya adalah tidak semua wilayah pada daerah-daerah terpencil tersentuh oleh pelayanan dokter. Jadi terpenuhinya kebutuhan penduduk akan dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak hanya masalah jumlah, namun juga distribusinya merata disetiap kabupaten maupun wilayah terpencil sekalipun.

3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dijadikan sebagai indikator untuk melihat indeks pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010

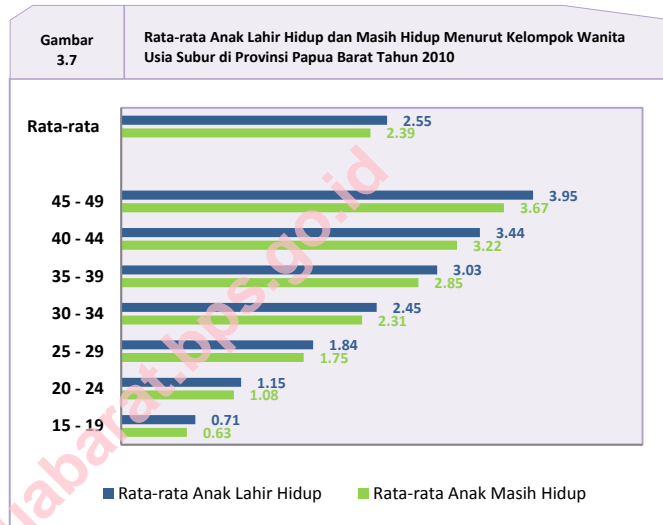
di bidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada balita dapat dilihat dari tingkat kematian bayi, penolong kelahiran, dan imunisasi pada balita.

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan seberapa besar kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang dijalani. Salah satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.

➤ **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi seringkali dijadikan sebagai indikator derajat kesehatan suatu daerah. Untuk menghasilkan AKB yang akurat diperlukan data dasar yang baik seperti Sensus Penduduk. Namun bila data dasar tersebut belum tersedia atau jaraknya terlalu jauh dengan tahun referensi maka dapat dilakukan dengan pendekatan lain. Salah satunya adalah AKB didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup. Berdasarkan data Susenas 2010, selisih tertinggi dari rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup berada pada

kelompok usia wanita antara umur 45-49 tahun. Hal ini dilihat dari selisih rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup mempunyai selisih terbesar di antara kelompok umur lainnya yaitu sebesar 0,28 poin.



Sumber : Susenas 2010

➤ Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Sementara itu salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi namun juga angka kematian ibu

akibat melahirkan. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara keselamatan ibu maupun anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah kelahiran. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong kelahiran pertama mengingat pada proses ini sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 54,14 persen penolong kelahiran balita dilakukan oleh bidan, kondisi ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 42,53 persen. Sementara penolong kelahiran tenaga medis lain sebesar 2,16 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 5,65 persen. Demikian pula penolong kelahiran oleh dokter mengalami penurunan tipis 0,01 persen menjadi 12,24 persen di tahun 2010. Keadaan yang lebih baik terlihat dari penurunan persentase penolong kelahiran oleh dukun. Penolong kelahiran oleh dukun mengalami penurunan cukup signifikan dari 27,26 persen di tahun 2009 menjadi 18,94 persen di tahun 2010.

Penolong kelahiran oleh dukun secara umum memang mengalami penurunan, namun di beberapa kabupaten persentasenya masih relatif tinggi, terutama pada kabupaten pemekaran. Di Kabupaten Raja Ampat 40,68 persen masyarakatnya masih menggunakan jasa dukun beranak dalam menolong proses persalinan. Bahkan di tiga kabupaten, yaitu Kaimana, Sorong Selatan, dan Tambrauw lebih dari setengah proses persalinan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010

Kabupaten/kota	Penolong Waktu Lahir					
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	3,93	69,05	3,70	19,40	3,93	0,00
Kaimana	3,50	41,19	0,00	25,91	29,40	0,00
Teluk Wondama	7,32	41,46	7,32	21,95	21,95	0,00
Teluk Bintuni	6,01	47,90	3,08	31,97	11,04	0,00
Manokwari	29,96	55,79	1,27	5,45	6,27	1,27
Sorong Selatan	2,04	34,42	3,02	14,74	43,74	2,04
Sorong	6,45	54,84	0,00	22,58	16,13	0,00
Raja Ampat	5,03	42,37	3,39	40,68	8,47	0,00
Tambrauw	0,00	38,33	5,00	30,00	26,67	0,00
Maybrat	4,44	51,11	8,89	24,44	11,11	0,00
Kota Sorong	16,00	68,00	0,00	13,33	2,67	0,00
Papua Barat 2010	12,24	54,14	2,16	18,94	12,15	0,39
Papua Barat 2009	12,25	42,53	5,65	27,26	11,20	1,11

Sumber : Susenas 2010

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penolong kelahiran pertama di Papua Barat paling utama dilakukan oleh bidan. Selain mayoritas proses persalinan tertangani oleh bidan, tren peningkatan penolong kelahiran oleh bidan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa bidan maupun tenaga kesehatan lain semakin membaik, sehingga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan, dan tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Di lain sisi, dengan masih tingginya penolong persalinan memakai tenaga non medis, terutama di daerah terpencil dan terisolir, perlu lebih digiatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga medis dalam proses

persalinan. Dan untuk mendukung aksi tersebut tentunya diharapkan ketersediaan tenaga medis, terutama bidan, sampai dengan level kecamatan dan desa dapat terpenuhi.

➤ **Imunisasi**

Angka kematian bayi sangat berhubungan erat dengan proses kelahiran, setelah itu masih banyak tahap yang harus dilalui seseorang untuk tetap *survive* terutama selama tahap usia balita. Untuk menjamin kesehatan balita yang rentan dengan ancaman penyakit, sangat perlu diberikan imunisasi agar kekebalan pada tubuh balita dapat terbentuk. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terserang penyakit dan atau menyebabkan kematian. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa di tahun 2010, persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis imunisasi yaitu 92,22 persen BCG; 89,47 persen DPT; 89,96 persen Polio; 77,54 persen campak/Morbili; dan sebanyak 85,65 persen imunisasi Hepatitis B. Persentase balita yang memperoleh imunisasi juga mengalami peningkatan untuk semua jenis imunisasi. Peningkatan penggunaan imunisasi terbesar adalah pada imunisasi Hepatitis B yaitu sebesar 5,49 persen. Sedangkan tingkat kesadaran terendah adalah penggunaan imunisasi Polio, dimana persentase dan peningkatan penggunaannya adalah yang paling rendah diantara pemakaian imunisasi lainnya. Peningkatan persentase penggunaan imunisasi pada seluruh jenis imunisasi pada balita menggambarkan bahwa pemahaman dan kesadaran akan pentingnya imunisasi pada balita semakin membaik. Perlu diketahui bahwa informasi pada tabel

ini tidak dapat menampilkan apakah balita yang bersangkutan telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, tetapi hanya menampilkan balita yang telah mendapatkan imunisasi.

Tabel 3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/kota	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbilli	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	98,18	96,25	96,36	81,23	99,09
Kaimana	98,66	98,09	97,99	86,05	98,66
Teluk Wondama	73,14	66,86	78,29	50,86	54,86
Teluk Bintuni	95,56	94,34	95,10	86,15	93,57
Manokwari	92,65	89,40	87,52	69,58	77,65
Sorong Selatan	87,35	86,07	91,23	82,47	86,85
Sorong	97,22	93,06	91,67	83,33	95,83
Raja Ampat	98,21	94,64	96,43	89,29	92,86
Tambrauw	84,21	76,69	81,95	69,17	77,44
Maybrat	95,70	97,85	97,85	89,25	78,49
Kota Sorong	88,89	85,56	85,00	75,56	85,00
Papua Barat 2010	92,22	89,47	89,96	77,54	85,65
Papua Barat 2009	88,56	87,29	87,52	77,29	80,16

Sumber: Susenas 2010

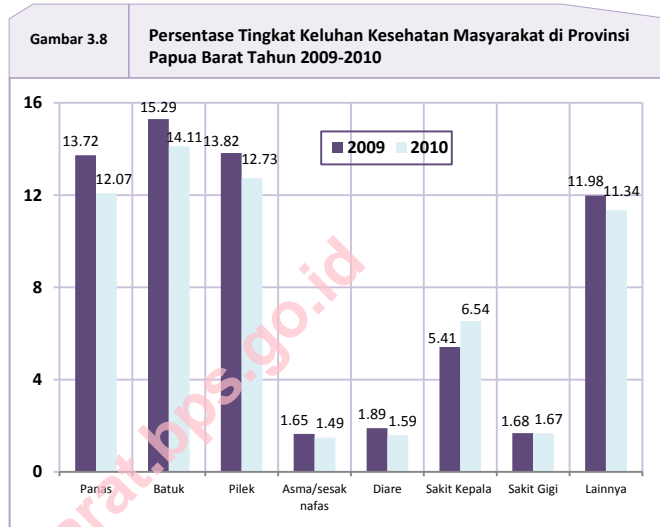
Komposisi persentase penggunaan imunisasi pada balita tertinggi berada di Kabupaten Kaimana untuk jenis imunisasi BCG, DPT dan Polio, yaitu dengan persentase masing-masing sebesar 98,66 persen; 98,09 persen; dan 97,99 persen. Sementara penggunaan tertinggi jenis imunisasi Campak/Morbilli adalah 89,29 persen berada di Kabupaten Raja Ampat, dan penggunaan imunisasi

tertinggi untuk Hepatitis B berada di Kabupaten Fakfak, yaitu sebesar 99,09 persen. Sedangkan penggunaan imunisasi terendah seluruhnya berada di Kabupaten Teluk Wondama dengan rincian: jenis imunisasi BCG (73,14 %); imunisasi DPT (66,86 %); imunisasi Polio (78,29 %); imunisasi Campak (50,86 %); dan imunisasi Hepatitis B (54,86 %). Kondisi ini diduga terkait dengan tingkat pemahaman yang rendah pada masyarakat atau dapat pula disebabkan minimnya tenaga medis yang ‘mengawal’ proses imunisasi pasca persalinan terutama pada penduduk di perdesaan.

➤ **Morbiditas/ Tingkat Pesakitan**

Banyaknya keluhan kesehatan digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin rendah. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa tiga keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di Papua Barat dalam dua tahun terakhir adalah batuk, pilek dan panas. Seperti halnya di tahun 2009, keluhan batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat di tahun 2010. Keluhan ini mengalami penurunan menjadi 14,11 persen dibandingkan tahun 2009 sebesar 15,29 persen. Keluhan terbanyak kedua adalah pilek yaitu sebesar 12,73 persen atau menurun dari kondisi 2009 yang mencapai 13,82 persen. Keluhan terbanyak ketiga adalah panas. keluhan penyakit ini menurun dari 13,72 persen menjadi 12,07 persen di tahun 2010. Secara umum seluruh keluhan kesehatan di tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

2009, kecuali pada keluhan sakit kepala yang justru meningkat dari 5,41 persen menjadi 6,54 persen.



Tiga keluhan yang secara umum paling banyak dirasakan (batuk, pilek, dan panas), paling banyak dikeluhkan pula oleh penduduk Kabupaten Tambrauw, yaitu sebesar 32,41 persen; 33,90 persen; dan 26,95 persen. Angka tersebut adalah persentase keluhan tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Papua Barat (lihat Tabel 3.7). Adalah tidak mengherankan kondisi ini terjadi disana karena kabupaten inilah yang paling minim bila dilihat dari ketersediaan sarana dan tenaga medis yang ada. Keluhan kesehatan secara agregat untuk tingkat provinsi, pada jenis penyakit asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan sakit lainnya masing-masing sebesar 1,49 persen; 1,59 persen; 6,54 persen; dan 1,67 persen.

Tabel 3.7 Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ sesak nafas	Diare	Sakit Kepala Berulan g	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	4,28	4,59	3,50	0,88	0,70	1,78	0,45	4,70
Kaimana	6,18	12,40	11,50	0,48	1,37	2,83	1,13	3,80
Teluk Wondama	24,56	27,97	20,66	1,46	5,56	18,32	3,70	10,53
Teluk Bintuni	15,32	15,13	15,31	2,09	2,60	8,57	3,04	25,18
Manokwari	10,57	13,41	11,59	1,53	0,81	3,28	1,04	12,70
Sorong Selatan	13,71	16,11	11,56	3,23	3,12	11,01	1,38	9,20
Sorong	12,42	12,95	11,48	1,74	1,87	5,61	1,20	11,35
Raja Ampat	21,78	17,27	14,69	1,80	2,84	6,19	3,22	11,73
Tambrauw	32,41	33,90	26,95	2,14	3,53	17,75	5,24	9,63
Maybrat	6,67	10,85	9,67	0,26	1,44	1,31	2,75	3,79
Kota Sorong	12,78	15,60	15,92	1,44	1,18	10,22	1,77	12,19
Papua Barat 2010	12,07	14,11	12,73	1,49	1,59	6,54	1,67	11,34

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Tingkat pesakitan juga dapat dilihat dari informasi mengenai lama sakit penduduk. Menurut data Susenas 2010 (lampiran 5), sebanyak 52,11 persen penduduk Papua Barat lama sakit kurang dari 3 hari; 37,68 persen lama sakit 4-7 hari; dan sisanya sebanyak 10,21 persen lama sakit lebih dari 7 hari. Kabupaten Tambrauw memiliki persentase penduduk terbesar yang mengalami sakit kurang dari 3 hari (66,82%) dan Kabupaten Fakfak memiliki persentase terkecil (41,23%). Sementara untuk lama sakit antara 4-7 hari persentase tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat yaitu sebesar 42,36 persen

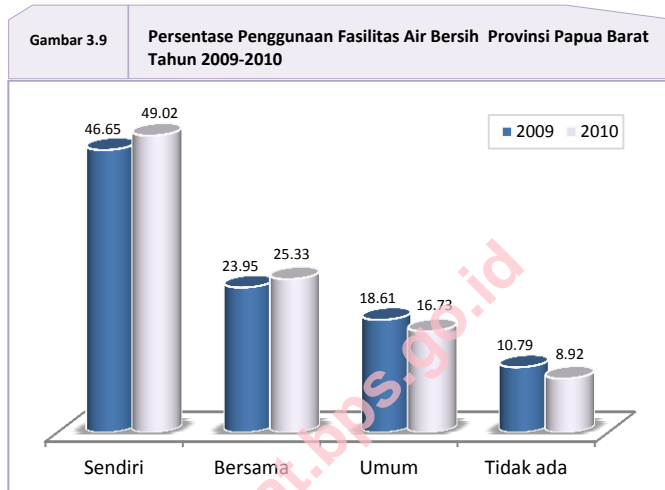
dan persentase terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama yaitu sebesar 22,27 persen. Lama sakit lebih dari 7 hari tertinggi berada di Kabupaten Fakfak (21,91%) dan terendah di Kabupaten Kaimana (3,64%).

Berdasarkan Data Susenas 2010 (lampiran 6) menunjukkan bahwa sebanyak 63,83 persen penduduk di Provinsi Papua Barat melakukan pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit yaitu dilakukan dengan tiga macam yaitu pengobatan tradisional, modern, dan lainnya. Sementara 36,17 persen lainnya melakukan pengobatan ke sarana kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan.

➤ **Penggunaan Air Bersih**

Selain dilihat dari tingkat morbiditas, derajat kesehatan masyarakat juga dapat diamati dari pola hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat tentunya lebih dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air bersih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2010 menunjukkan bahwa sebesar 49,02 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air minum sendiri; 25,33 persen milik bersama; 16,73 persen fasilitas umum; dan 8,92 persen tidak ada fasilitas air minum. Perkembangan kondisi penggunaan air bersih mengalami perbaikan kualitas, hal ini terlihat dari meningkatnya fasilitas air minum sendiri dan bersama serta semakin menurunnya persentase penggunaan fasilitas air minum

milik umum dan tidak memiliki fasilitas dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 3.9).



Kabupaten Sorong Selatan menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Papua Barat sebagai kabupaten yang rumah tangganya tidak ada fasilitas air minum (45,62%). Rumah tangga di Kabupaten Fakfak terbanyak memiliki fasilitas air minum sendiri (82,72%), sedangkan Kabupaten Sorong Selatan adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum sendiri yaitu sebesar 14,14 persen.

Kondisi penggunaan fasilitas air minum memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa kabupaten/kota. Sebagian besar diantaranya telah memiliki kondisi yang lebih baik dengan menggunakan fasilitas air minum milik sendiri maupun yang

digunakan secara bersama. Namun di beberapa kabupaten seperti Teluk Wondama, Sorong Selatan, Sorong, dan Maybrat persentase penggunaan fasilitas air minum milik umum dan bahkan tidak memiliki fasilitas umum masih relatif tinggi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan dari masyarakat yang bersangkutan (lihat Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/kota	Fasilitas Air Minum				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	82,72	9,03	5,25	3,00	100,00
Kaimana	44,45	40,78	14,77	0,00	100,00
Teluk Wondama	18,72	28,88	35,83	16,58	100,00
Teluk Bintuni	58,06	38,35	3,06	0,53	100,00
Manukwari	41,53	35,17	19,76	3,55	100,00
Sorong Selatan	14,14	15,89	24,35	45,62	100,00
Sorong	49,38	10,63	3,75	36,25	100,00
Raja Ampat	38,81	28,36	32,84	0,00	100,00
Tambrauw	22,51	60,73	8,38	8,38	100,00
Maybrat	37,34	9,49	53,16	0,00	100,00
Kota Sorong	70,40	23,20	5,60	0,80	100,00
Papua Barat 2010	49,02	25,33	16,73	8,92	100,00

Sumber: Susenas, 2009-2010

➤ Penggunaan Pembuangan Tinja

Selain fasilitas air minum, sanitasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Hal yang sangat penting adalah penggunaan pembuangan tinja. Pengelolaan pembuangan akhir ini harus memiliki tempat tersendiri sehingga tidak menimbulkan

penyakit. Data pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat mempunyai persentase yang sangat rendah pada fasilitas tempat buang air besar sendiri yaitu masing-masing sebesar 33,51 persen dan 26,83 persen. Bahkan pada dua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar mencapai 47,12 persen dan 48,78 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang sebagian besar rumah tangganya telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri adalah Kabupaten Sorong (76,32%), Kota Sorong (69,76%); Kabupaten Manokwari (68,60%); Kabupaten Fakfak (64,74%), dan Kabupaten Teluk Bintuni (63,62%).

Secara umum, sebanyak 15,30 persen dari semua rumah tangga di Papua Barat tidak ada atau tidak memiliki tempat pembuangan tinja. Sedangkan rincian lainnya yaitu sebesar 61,07 persen memiliki fasilitas pembuangan air besar sendiri; 14,68 persen milik bersama; dan 8,95 persen milik umum.

Masih tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem sanitasi di Provinsi Papua Barat. Namun demikian, dengan semakin menurunnya persentase penggunaan fasilitas buang air besar umum, dan berkurangnya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar serta meningkatnya persentase penggunaan fasilitas buang air besar milik sendiri dan bersama, menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kondisi kesehatan dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Tabel 3.9 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Total
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	64,74	10,92	11,47	12,87	100,00
Kaimana	44,18	16,40	11,14	28,27	100,00
Teluk Wondama	36,78	35,95	7,85	19,42	100,00
Teluk Bintuni	63,62	20,22	8,84	7,33	100,00
Manokwari	68,60	12,26	0,59	18,55	100,00
Sorong Selatan	35,24	10,51	22,20	32,06	100,00
Sorong	76,32	10,53	6,32	6,84	100,00
Raja Ampat	42,37	14,12	35,59	7,91	100,00
Tambrauw	33,51	15,71	3,66	47,12	100,00
Maybrat	20,83	3,66	20,73	48,78	100,00
Kota Sorong	69,76	17,96	6,89	5,39	100,00
Papua Barat 2010	61,07	14,68	8,95	15,30	100,00
Papua Barat 2009	59,49	12,37	10,98	17,16	100,00
Papua Barat 2008	49,52	19,29	11,56	19,63	100,00

Sumber: Susenas, 2008-2010

3.3 Kondisi Pendidikan

Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanahkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sebuah pesan penting terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam tujuan bangsa Indonesia itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan sebuah perjuangan dan usaha melalui kegiatan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 juga telah jelas mengaturnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu lebih khusus dalam UU No.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV Bagian 1 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kedua ayat ini secara jelas memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17 UU Sisdiknas 2003).

Upaya mempercepat tercapainya gerakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan. Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (PWPPBA). Berbagai lini institusi terkait dilibatkan dalam upaya gerakan pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Target yang ingin dicapai dalam Inpres No. 5 tahun 2006 antara lain adalah:

- a. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau Angka Partisipasi Murni sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- b. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- c. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas atau sekurang-kurangnya menjadi 5 persen pada akhir tahun 2009.

Pemerintah juga telah melakukan sebuah langkah konkret dalam upaya mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang dicantumkan dalam amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Suatu angka yang fantastik yang sebelumnya angka tersebut tidak pernah lebih dari lima persen. Meskipun telah di-Undang-undangkan dari tahun 2003 namun sampai tahun 2010 realisasi untuk menganggarkan jumlah

minimal 20 persen dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara belum tercapai, walaupun begitu besarnya anggaran berangsur-angsur telah mendekati target. Dan kemungkinan di tahun 2010, rencana mengalokasikan 20 persen dari total anggaran untuk keperluan pembiayaan pendidikan akan dapat tercapai.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

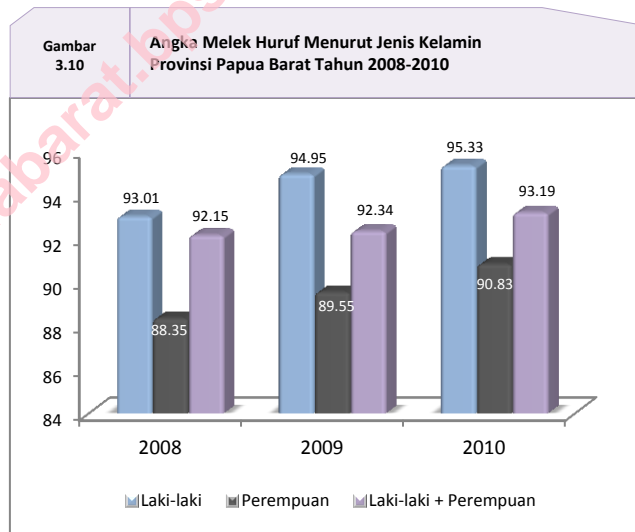
3.3.1 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf mengindikasikan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Bagaimanapun juga kemampuan dasar pertama kali yang dimiliki seseorang untuk dapat menambah dan mengasah ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2010 adalah sebesar 93,19 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 dan 2009 yaitu sebesar 90,15 persen dan 92,34 persen. Semakin tinggi angka melek huruf maka kenaikan persentase angka melek huruf ini akan cenderung semakin lambat. Dalam artian pertumbuhan angka melek hurufnya semakin kecil atau mengalami perlambatan. Angka melek huruf menurut jenis kelamin menunjukkan

kecenderungan bahwa penduduk laki-laki mempunyai angka melek huruf yang lebih baik dari pada angka melek huruf penduduk perempuan pada tahun 2008-2010. Hal ini menggambarkan belum adanya kesetaraan gender dalam hal kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Provinsi Papua Barat.

Angka melek huruf penduduk laki-laki tahun 2009 sebesar 94,95 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yaitu sebesar 93,01 persen. Angka melek huruf penduduk laki-laki kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 95,33 persen terhadap tahun 2009, atau mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen.



Angka melek huruf perempuan walaupun selalu lebih rendah dari angka melek huruf penduduk laki-laki juga menunjukkan tren peningkatan yang serupa dengan penduduk laki-laki. Angka melek huruf perempuan mengalami peningkatan menjadi 90,83 persen di

tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 dan 2008 yang masing-masing besarnya 88,55 persen dan 88,35 persen.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia angka melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.

Sebaran kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya menurut kabupaten/kota dan angka buta huruf dapat dilihat pada Tabel 3.10. Secara agregat, kemampuan membaca huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya berturut-turut adalah 95,33 persen; 4,67 persen; dan 90,83 persen. Kemampuan penduduk membaca huruf latin tertinggi berada di Kota Sorong yakni sebesar 99,63 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Tambrau sebesar 81,48 persen.

Angka buta huruf diperoleh dari banyaknya penduduk berusia 10 tahun keatas yang tidak mampu membaca huruf latin dan atau huruf lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas atau seratus persen jumlah penduduk dikurangi dengan persentase angka melek huruf maka diperoleh angka buta huruf. Pada angka buta huruf batasan umur yang digunakan juga penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Namun angka buta huruf juga dapat dihitung untuk penduduk diatas 15 tahun atau sesuai dengan kebutuhan analisis. Angka buta huruf penduduk usia 10 tahun keatas tertinggi terjadi di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Teluk Wondama yaitu sebesar 27,27 persen dan 18,40 persen. Sementara

angka buta huruf terendah berada di Kota Sorong yaitu sebesar 1,40 persen. Sementara angka buta huruf penduduk usia 10 tahun keatas secara umum di Papua Barat adalah sebesar 9,17 persen.

Tabel 3.10 Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Linnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2010

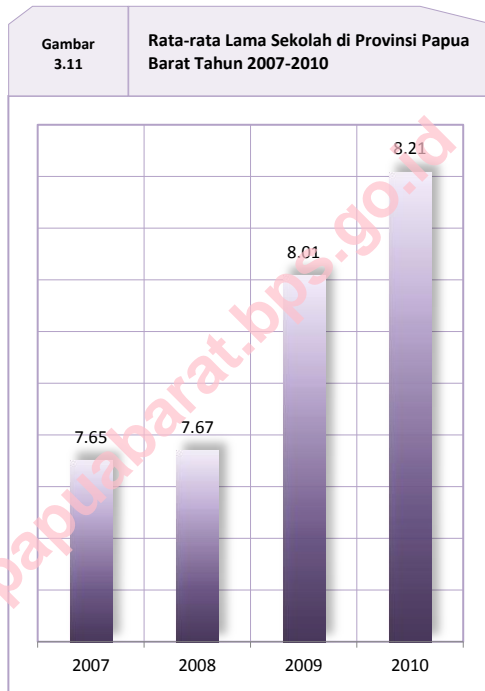
Kabupaten/kota	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	98,22	1,78	96,66	3,34
Kaimana	97,70	2,30	92,87	7,13
Teluk Wondama	86,19	13,81	81,60	18,40
Teluk Bintuni	87,88	12,12	83,48	16,52
Manokwari	91,07	8,93	84,19	15,81
Sorong Selatan	90,83	9,17	85,27	14,73
Sorong	96,73	3,27	85,93	14,07
Raja Ampat	95,50	4,50	91,61	8,39
Tambrauw	81,48	18,52	72,73	27,27
Maybrat	91,59	8,41	89,73	10,27
Kota Sorong	99,63	0,37	98,60	1,40
Prov. Papua Barat	95,33	4,67	90,83	9,17

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan

jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun keatas. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.



Berdasarkan Gambar 3.11, rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 8,21 tahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2009 dan 2008 yakni sebesar 8,01 tahun dan 7,67 tahun.

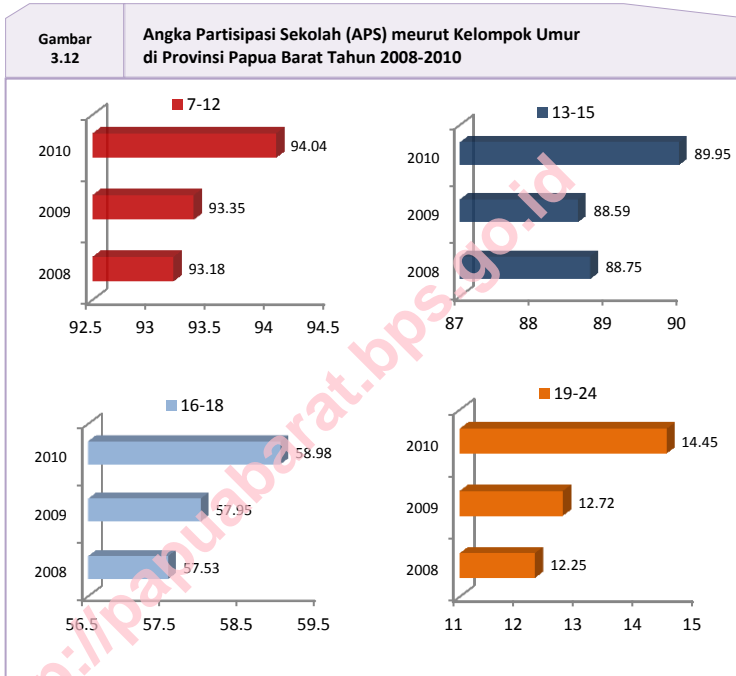
Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2010 sebesar 8,21 artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP.

3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari 93,18 persen di tahun 2008 menjadi 93,35 persen di tahun 2009. APS pada usia ini kembali meningkat menjadi 94,04 persen di tahun 2010. Kondisi yang sama terjadi pada penduduk usia 13-15 tahun. Pada kondisi ini APS juga mengalami penurunan tipis dari tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu dari 88,75 persen menjadi 88,59 persen. Namun di tahun 2010 APS di usia ini kembali mengalami peningkatan menjadi 89,95 persen. Hal yang sama terjadi pada APS penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun dengan APS usia 7-12 tahun, kedua kelompok umur ini juga terus mengalami peningkatan angka APS dan mempunyai kesamaan pola perkembangan. APS Penduduk usia 16-18 mengalami peningkatan dari 57,53 persen di tahun 2008 menjadi 57,95 persen di tahun 2009. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi 58,98 persen. APS

penduduk usia 19-24 tahun mengalami peningkatan tipis dari 12,25 persen di tahun 2008 menjadi 12,72 persen di tahun 2009, di tahun 2010 APS usia 19-24 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 14,45 persen.



Pada tahun 2010, APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 94,04 persen berarti masih ada sekitar 5,96 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Demikian pula pada penduduk usia 13-15 dan 16-18 persen, terdapat 11,05 persen dan 41,02 persen pada kelompok umur tersebut yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Sementara

pada penduduk usia 19-24 hanya 14,45 persen saja yang melanjutkan sekolah.

Peningkatan APS penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, dan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini memberikan optimisme bahwa angka APS untuk semua jenjang kelompok umur akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu pada interval usia di tingkat sekolah tersebut.

Secara agregat, di tahun 2010 terjadi peningkatan APK di hampir seluruh jenjang pendidikan kecuali pada jenjang pendidikan SD/MI dibandingkan tahun 2009. Pada periode sebelumnya, terjadi peningkatan APK tahun 2009 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMU/MA serta terjadi penurunan APK pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan perguruan tinggi dibandingkan dengan tahun 2008. Perubahan pola ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan yang positif pada perbaikan kondisi pendidikan di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	111,80	58,46	70,87	16,45
Kaimana	119,62	54,35	36,18	3,20
Teluk Wondama	117,65	87,72	50,00	9,24
Teluk Bintuni	117,25	55,77	40,43	7,06
Manokwari	110,96	68,07	84,48	29,36
Sorong Selatan	112,26	43,24	32,95	9,94
Sorong	117,89	59,52	73,68	6,49
Raja Ampat	142,15	62,00	48,65	8,70
Tambrauw	107,98	67,35	46,15	5,00
Maybrat	125,20	61,22	82,35	5,00
Kota Sorong	108,74	84,06	86,25	18,54
Papua Barat (2010)	115,00	66,68	72,07	16,80
Papua Barat (2009)	117,50	66,29	62,04	8,41
Papua Barat (2008)	112,68	89,99	57,25	9,73

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2010

APK SD tahun 2010 sebesar 115,00 persen artinya masih terdapat penduduk diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) yang sedang bersekolah SD/MI karena APK berada diatas 100 persen. Dengan kata lain, sekitar 15 persen siswa yang sedang bersekolah SD/MI berada diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun), baik itu kurang dari usia 6 tahun maupun lebih dari usia 12 tahun.

Menurut data Susenas 2010, APK SD/MI seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat berada diatas 100 persen.

APK SD/MI tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu dari 117,50 persen menjadi 115,00 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa penduduk yang bersekolah SD/MI sudah semakin tepat bersekolah pada kelompok umurnya dibandingkan periode sebelumnya. APK SD/MI Kabupaten Raja Ampat adalah APK tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 142,15 persen. Artinya hampir setengah dari jumlah siswa SD/MI yang sedang bersekolah berada diluar batas usia sekolah ideal 7-12 tahun. APK SD/MI terendah berada pada Kabupaten Tambrau sebesar 107,98 persen.

APK SLTP/MTs Papua Barat tahun 2009 sebesar 66,29 persen mengalami peningkatan menjadi 66,68 persen pada tahun 2010, setelah sebelumnya mengalami penurunan dari 89,99 persen di tahun 2008. APK SLTP/MTs sebesar 66,68 persen mengandung arti banyaknya penduduk yang sedang bersekolah di SLTP/MTs hanya sebesar 66,68 persen diantara penduduk berumur 13-15 tahun, selebihnya tidak sedang menempuh pendidikan, oleh karena putus sekolah, tidak mampu melanjutkan sekolah, atau alasan lainnya yang menyebabkan tidak melanjutkan sekolah.

Distribusi APK SLTP/MTs menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Teluk Wondama memiliki APK yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yakni sebesar 87,72 persen. Kabupaten Sorong Selatan memiliki APK SLTP/MTs terendah yaitu sebesar 43,24 persen, artinya lebih dari setengah diantara penduduk usia 13-15 tahun sedang tidak bersekolah di SLTP/MTs karena putus sekolah atau tidak mampu bersekolah.

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	93,42	48,74	46,12	10,08
Kaimana	95,80	38,98	26,28	0,80
Teluk Wondama	83,66	56,14	25,00	3,36
Teluk Bintuni	97,31	41,51	19,87	3,00
Manokwari	88,44	55,34	51,26	11,69
Sorong Selatan	89,17	30,61	17,92	3,47
Sorong	93,68	47,62	42,11	1,30
Raja Ampat	95,04	42,00	21,62	n.a.
Tambrau	90,96	48,98	35,90	5,00
Maybrat	97,56	38,78	66,18	5,00
Kota Sorong	91,26	57,97	50,00	9,55
Papua Barat (2010)	91,91	49,65	43,93	7,36
Papua Barat (2009)	91,25	49,03	43,55	6,25
Papua Barat (2008)	90,71	48,92	43,61	6,06

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2010

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SLTP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun dan APM SLTA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun serta APM perguruan tinggi untuk penduduk yang berusia 19-24 tahun.

Angka partisipasi murni Provinsi Papua Barat tahun 2010 mengalami peningkatan di semua level pendidikan dibandingkan tahun 2009. APM SD/MI meningkat menjadi 91,91 persen pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 91,25 persen. APM SD/MI sebesar 91,91 persen mempunyai makna hampir 92 orang diantara 100 penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah siswa SD/MI dan tepat berumur 7-12 tahun.

APM SLTP/MTs meningkat menjadi 49,65 persen di tahun 2010 setelah pada tahun sebelumnya sebesar 49,03 persen. APM SLTP/MTs jauh lebih kecil dibandingkan dengan APM SD/MI hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ikut berpartisipasi sekolah SLTP/MTs dibandingkan dengan penduduk yang berpartisipasi sekolah SD/MI pada usia 7-12 tahun sangat rendah atau dengan kata lain banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/MTs pada penduduk berusia 13-15 tahun.

APM SLTA//MA tahun 2010 hanya mencapai 43,93 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang semula sebesar 43,55 persen. Pada jenjang pendidikan ini, APM-nya juga lebih rendah dari APM SLTP/MTs. Artinya tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah SLTA//MA tepat pada umur 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah SLTP/MTs tepat pada usia 13-15 tahun. Dapat diartikan pula proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah di SLTA//MA lebih kecil dibandingkan dengan proporsi penduduk usia 13-15 tahun untuk melanjutkan pendidikan SLTP/MTs.

Kecenderungan yang terlihat dari APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi adalah bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka tingkat partisipasinya semakin rendah. Dengan demikian dapat diartikan pula semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka angka putus sekolahnya semakin besar.

Berdasarkan sebarannya menurut kabupaten/kota, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI berada di Kabupaten Maybrat yaitu sebesar 97,56 persen; APM SLTP/MTs berada di Kota Sorong sebesar 57,97 persen; APM SLTA/MA di Kabupaten Maybrat sebesar 66,18 persen; dan APM Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Manokwari sebesar 11,69 persen.

Tren perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan memang mengalami peningkatan, namun angka APM untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs keatas masih relatif rendah. Apalagi *gap* antara APM SD/MI dengan SLTP/MTs terlalu jauh. Hal ini menginformasikan bahwa siswa putus sekolah terbesar terjadi ketika siswa menyelesaikan pendidikan SD/MI dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTP/MTs.

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat

perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.

Tabel 3.13 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2008-2010

Kabupaten/kota	Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki					Total
	Tidak punyai ijazah	SD/se-derajat	SMP/se-derajat	SLTA/se-derajat	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
Fakfak	25,55	30,82	17,49	18,60	4,82	100,00
Kaimana	28,27	28,50	15,57	19,53	6,73	100,00
Teluk Wondama	29,68	25,29	19,03	22,09	5,14	100,00
Teluk Bintuni	28,45	19,44	17,84	27,63	10,63	100,00
Manokwari	24,45	35,88	12,79	12,81	4,26	100,00
Sorong Selatan	34,26	25,00	18,42	17,93	5,10	100,00
Sorong	33,55	35,45	13,04	12,56	5,88	100,00
Raja Ampat	33,07	28,46	10,38	11,01	4,09	100,00
Tambrau	46,07	26,21	23,95	12,86	9,00	100,00
Maybrat	27,97	30,82	17,49	18,60	4,82	100,00
Kota Sorong	20,55	17,02	16,95	34,43	11,04	100,00
Papua Barat (2010)	26,24	23,32	17,49	24,59	8,36	100,00
Papua Barat (2009)	33,62	23,64	16,85	19,08	6,82	100,00
Papua Barat (2008)	32,84	25,68	18,16	18,54	4,79	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2010

Dalam Tabel 3.13 secara umum di Provinsi Papua Barat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tampak pada besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah. Pada tahun 2010 persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah hampir dari separuh penduduk berusia 10 tahun di Papua Barat atau sebesar 49,56 persen. Persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu menjadi 26,24 persen. Sementara penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) pada tahun 2010 adalah sebesar 32,95 persen dengan rincian 24,59 persen berpendidikan SLTA/ sederajat dan 8,36 persen berpendidikan perguruan tinggi. Kondisi penduduk yang berpendidikan tinggi pada tahun 2010 menjadi sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 penduduk yang berpendidikan SLTA keatas sebesar 25,89 persen (19,08 persen berpendidikan SLTA dan 6,82 persen berpendidikan perguruan tinggi) atau mengalami peningkatan sebesar 1,54 persen. Kondisi ini menandakan terdapat perbaikan kualitas pendidikan dengan menurunnya persentase pendidikan rendah dan meningkatnya persentase pendidikan tinggi.

Kualitas pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut sebaran kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Sorong memiliki kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tertinggi yang paling baik. Kota Sorong mempunyai persentase penduduk dengan pendidikan tinggi terbesar diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 11,04 persen. Disamping itu, Kota Sorong juga memiliki persentase penduduk yang berpendidikan rendah yang paling kecil yaitu hanya 37,57 persen. Disisi lain,

Kabupaten Tambrau menjadi kabupaten dengan kualitas pendidikan sumber daya manusia paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya. Persentase penduduk yang berpendidikan rendah di Kabupaten Tambrau mencapai 72,28 persen dengan rincian 46,07 persen tidak punya ijazah (tidak pernah sekolah/tidak tamat SD) dan 26,21 persen hanya tamatan SD. Sedangkan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi terendah terdapat di Kabupaten Raja Ampat yaitu hanya 4,09 persen, dan sebesar 11,01 persen berpendidikan tertinggi.

3.3.5 Angka Mengulang dan Putus Sekolah

Angka mengulang dan putus sekolah merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Angka mengulang mencerminkan ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan proses belajar mengajar pada tingkat tertentu dalam sebuah jenjang pendidikan sehingga mengharuskan siswa tersebut untuk mengulang kembali proses belajar mengajar pada tingkat yang sama pada tahun berikutnya. Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu dan sering pula digunakan sebagai indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan tidak ada fasilitas sekolah pada daerah domisili.

Tabel 3.14 Jumlah Siswa Mengulang dan Persentase Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%	Siswa meng-ulang	Jumlah Siswa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	4.096	103.272	4,12	210	24.268	0,97	270	15.345	1,85
2008	4.375	109.246	4,24	86	26.658	0,35	281	16.806	1,83
2009	4.896	114.442	4,48	279	31.399	1,05	192	17.810	1,08
2010	6.922	123.198	6,05	234	35.628	0,75	178	18.665	1,00

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Berdasarkan Tabel 3.14, persentase siswa yang mengulang tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD. Pada tahun 2008 jumlah siswa yang mengulang sebesar 4.375 siswa (4,24 persen). Kondisi tahun 2009 jumlah dan persentase siswa yang mengulang naik menjadi 4.896 siswa atau 4,48 persen. Pada tahun 2010 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 6,05 persen atau terdapat 6.922 siswa yang mengulang.

Pada jenjang pendidikan SLTP angka mengulang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Persentase siswa mengulang pada jenjang pendidikan ini berturut-turut pada tahun 2008-2010 yaitu 0,35 persen; 1,05 persen; dan 0,75 persen.

Angka mengulang di jenjang pendidikan SLTA secara persentase memperlihatkan tren yang menurun dari tahun 2008-2010. Secara absolut, jumlah siswa yang mengulang pada tahun 2008-2010 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah siswa yang mengulang mengalami peningkatan menjadi 281 siswa (1,83%).

Selanjutnya di tahun 2009 dan 2010 jumlah siswa yang mengulang mengalami penurunan menjadi 192 siswa dan 178 siswa, demikian pula dengan persentase siswa yang mengulang pada periode yang sama, menurun menjadi 1,08 persen dan 1,00 persen.

Tabel 3.15 Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%	Siswa putus sekolah	jumlah siswa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	5.254	103.272	5,28	873	24.268	4,01	906	15.345	4,90
2008	3.815	109.246	3,69	463	26.658	1,91	760	16.806	3,51
2009	3.401	114.442	3,11	927	31.399	3,48	932	17.810	5,55
2010	3.210	123.196	2,81	136	35.628	0,43	794	18.665	4,46

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Jumlah siswa putus sekolah pada pembahasan ini adalah jumlah siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya pada saat sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi angka putus sekolah disini tidak dapat mendeteksi jumlah siswa putus sekolah lainnya yang terjadi ketika siswa telah lulus dari jenjang pendidikan tertentu dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya karena yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu.

Berdasarkan Tabel 3.15 terdapat kecenderungan bahwa angka putus sekolah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2009, angka putus sekolah pada jenjang SLTP dan SMA mengalami

peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD, secara persentase siswa yang putus sekolah mengalami penurunan. Pada tahun 2008 persentase siswa putus sekolah mencapai 3,69 persen. Pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 3,11 persen. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2010 dimana persentase siswa putus sekolah hanya 2,81 persen. Sejalan dengan penurunan persentase siswa putus sekolah, secara absolut jumlah siswa yang putus sekolah juga mengalami penurunan pada tahun 2008-2010. Pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah mencapai 3.815 siswa dan pada tahun 2009 dan 2010, jumlah tersebut berkurang menjadi 3.401 siswa dan 3.210 siswa.

Pada jenjang pendidikan SLTP tahun 2009, jumlah siswa putus sekolah mengalami peningkatan tajam dibandingkan keadaan tahun 2008. Semula di tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah berjumlah 463 siswa (1,91 persen), namun di tahun 2009 jumlah siswa putus sekolah meningkat cukup signifikan menjadi 927 siswa (3,48 persen). Jumlah siswa putus sekolah mengalami penurunan drastis menjadi 136 siswa atau sebesar 0,43 persen di tahun 2010.

Pada jenjang pendidikan SLTA jumlah siswa maupun persentase siswa putus sekolah terus mengalami kecenderungan seperti halnya dengan angka putus sekolah SLTP. Di tahun 2009 jumlah siswa putus sekolah sebesar 932 siswa (5,55 persen), meningkat dibandingkan tahun 2008 yang semula sebesar 760 siswa (3,51 persen). Selanjutnya jumlah siswa putus sekolah 2010 kembali mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2009 menjadi 794 siswa (4,46 persen).

3.3.6 Rasio-rasio Pendidikan

Terdapat banyak sekali indikator-indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja pendidikan. Diantaranya digunakan rasio-rasio dari variabel-variabel pendidikan. Sebagai contoh adalah rasio guru-murid, guru-kelas, murid-kelas, murid-sekolah, dan kelas-sekolah.

Tabel 3.16 Tabel Rasio-rasio Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	Siswa/Guru			Siswa/Kelas			Kelas/Guru			Siswa/Sekolah			Kelas/Sekolah		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2007	22	10	13	23	36	32	0,93	0,29	0,40	135	190	320	5,85	5,23	9,94
2008	20	9	13	23	27	33	0,86	0,34	0,38	128	200	336	5,59	7,34	10,26
2009	21	11	12	30	33	33	0,64	0,34	0,37	133	191	318	4,03	5,87	9,64
2010	20	14	13	25	33	32	0,77	0,42	0,39	157	225	306	6,15	6,84	9,57

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Rasio siswa-guru digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru. Rasio ini untuk mengetahui berapa beban seorang guru mengajar sejumlah siswa. Terlihat bahwa beban guru SD, SLTP dan SLTA masih pada batas yang wajar. Beban seorang guru SD rata-rata mengajar sekitar 20 orang siswa, beban seorang guru SLTP rata-rata mengajar sekitar 14 siswa dan beban seorang guru SLTA rata-rata mengajar 13 orang siswa. Walaupun terlihat sangat wajar dan tidak menanggung beban yang berlebih namun indikator ini hanya mewakili beban secara umum meskipun

pada kenyataannya terutama di daerah pedalaman kadang-kadang seorang guru harus mengajar beberapa kelas sekaligus.

Rasio siswa terhadap kelas menggambarkan rata-rata daya tampung siswa dalam satu kelas. Rata-rata daya tampung kelas siswa pada jenjang pendidikan SD tahun 2007-2010 sekitar 23-30 siswa dalam satu kelas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP berkisar antara 27-36 siswa dalam satu kelas. Rasio siswa-kelas pada jenjang pendidikan SLTA berkisar antara 32-33 siswa per kelas. Bila dilihat dari sebaran siswa per kelas masih didalam batas kewajaran.

Rasio kelas-guru digunakan untuk melihat perbandingan jumlah guru dengan jumlah kelas. Rasio ini menggambarkan ketersediaan guru terhadap jumlah ruangan yang ada di sekolah tersebut. Bila nilai rasio ada di atas satu maka dapat dikatakan bahwa banyaknya guru yang ada tidak cukup untuk didistribusikan ke dalam kelas yang tersedia. Hal ini mengandung arti bahwa seorang guru dapat mengajar lebih dari satu kelas karena keterbatasan jumlah guru.

Pada jenjang pendidikan SD nilai rasio kelas-guru seluruhnya berada dibawah satu. Berarti jumlah guru SD yang tersedia cukup untuk didistribusikan ke dalam banyaknya kelas. Namun jumlah guru yang digunakan sebagai pembagi dalam rasio ini termasuk kepala sekolah, guru olah raga, guru agama, guru kesenian dan guru lainnya yang mengajar pelajaran-pelajaran khusus disamping guru yang mengajar setiap harinya.

Hal senada juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Seluruh nilai rasio berada di bawah satu. Namun bedanya pada jenjang pendidikan ini nilai rasionya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari nilai rasio pada jenjang pendidikan SD yakni berada diantara

0,29-0,42. Nilai rasio yang semakin kecil menunjukkan ketercukupan jumlah guru dalam memenuhi kuota kelas yang ada. Perlu diketahui bahwa mulai jenjang pendidikan SLTP setiap mata pelajaran diajar oleh guru yang berbeda. Kelemahan dari rasio ini bila diterapkan pada jenjang SLTP maupun SLTA tidak dapat mendeteksi ketidakcukupan guru terhadap kelas tanpa membaginya dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Jadi masih terjadi kemungkinan seorang guru dapat mengajar beberapa mata pelajaran yang berbeda meskipun bukan keahliannya mengajar pada mata pelajaran tersebut.

Pada rasio kelas-sekolah dapat dibandingkan berapa rata-rata jumlah kelas di setiap sekolah. Nilai rasio kelas-sekolah bila dibandingkan lagi dengan jumlah tingkat maka dapat diketahui rata-rata ada berapa kelas dalam satu tingkat dalam sekolah.

Rasio kelas-sekolah pada jenjang pendidikan SD bernilai 5,59 pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009 rasio kelas-sekolah menurun menjadi 4,03. Namun pada tahun 2010 rasio tersebut meningkat menjadi 6,15. Selama tahun 2007-2009 rasio kelas-sekolah untuk jenjang pendidikan SD selalu dibawah enam. Padahal jumlah tingkat untuk jenjang pendidikan SD ada enam, di mulai dari kelas satu sampai dengan kelas enam. Bila nilai rasio berada dibawah nilai enam berarti bahwa rata-rata jumlah kelas di sebuah sekolah hanya sekitar 4-5 unit saja. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah kelas di Provinsi Papua Barat pada jenjang pendidikan SD. Implikasi dari kurangnya ruangan kelas ini adalah ruang kelas di pakai secara bergantian untuk menampung siswa yang tidak mempunyai ruang kelas. Atau

kemungkinan dalam sebuah sekolah jumlah tingkatnya tidak sampai dengan kelas enam. Jadi pihak sekolah hanya menyelenggarakan sekolah hanya sampai tingkat sebelum tingkat enam (kelas enam).

Rasio kelas-sekolah pada jenjang pendidikan SLTP diperoleh nilai rasio antara 5,23-7,34 artinya rata-rata setiap sekolah mempunyai sekitar 5-8 kelas. Bila jumlah tingkat pada jenjang pendidikan SLTP sampai pada kelas tiga, berarti tiap tingkat rata-rata mempunyai sekitar dua sampai tiga kelas di sekolah tersebut.

Untuk jenjang pendidikan SLTA, rasio kelas-sekolah berkisar antara 9,57-10,26 kelas per sekolah. Bila tingkat pada jenjang ini sampai pada kelas tiga, berarti rata-rata tiap tingkat di setiap sekolah mempunyai 3-4 ruang kelas.

3.3.7 Tingkat Kelulusan Siswa

Disetiap menjelang akhir tahun ajaran sekolah seringkali di media ramai dibicarakan tentang nasib siswa yang telah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN). Pengumuman kelulusan dari hasil nilai ujian nasional diberitakan membawa kegembiraan bagi yang merasa lulus ujian dan kesedihan bagi yang gagal dalam menempuh ujian.

Tingkat kelulusan adalah proporsi siswa kelas enam SD atau siswa kelas tiga SLTP dan SLTA yang dinyatakan lulus ujian akhir nasional terhadap jumlah siswa pada kelas tersebut yang mengikuti ujian akhir nasional, dimana batas kelulusan ditentukan oleh nilai minimum UAN sesuai dengan standar dari Kemendiknas.

Tabel 3.17 Tingkat Kelulusan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	SD			SLTP			SLTA		
	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus	Lulus	Tidak Lulus	% Lulus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	11.418	630	94,77	5.770	1.479	79,60	3.990	444	91,39
2008	11.280	555	95,31	7.252	239	96,81	4.236	287	95,43
2009	12.682	577	95,45	7.200	470	93,47	4.449	403	90,94
2010	13.298	717	94,88	8.374	523	94,12	4.891	464	91,34

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Tabel 3.17 memberikan informasi bahwa meskipun bila dilihat secara persentase tingkat kelulusan menunjukkan angka yang tinggi, namun bila dilihat secara absolut, maka jumlah siswa yang tidak lulus termasuk sangat tinggi untuk semua jenjang pendidikan karena masih pada kisaran ratusan siswa. Perkembangan kelulusan tahun 2007-2010 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung mengalami peningkatan namun menurun pada tahun 2010, lain halnya dengan perkembangan kelulusan SLTP/MTs dan SLTA/MA yang cenderung lebih fluktuatif setiap tahunnya.

Tingkat kelulusan SD pada tahun 2008 mencapai 95,31 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 555 siswa. Persentase kelulusan siswa SD kembali mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi sebesar 95,45 persen dibandingkan dengan tahun 2008, meskipun jumlah siswa yang tidak lulus bertambah menjadi 577 siswa. Kemudian tingkat kelulusan pada tahun 2010 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 94,88 persen dengan jumlah siswa tidak lulus mencapai 717 siswa.

Pada jenjang pendidikan SLTP, persentase kelulusan siswa pada tahun 2008 mencapai 96,81 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 239 siswa. Selanjutnya di tahun 2009 persentase kelulusan siswa mengalami penurunan yaitu menjadi 93,47 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus mencapai 470 siswa. Namun pada tahun 2010 angka kelulusan tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 94,12 persen, meskipun jumlah siswa yang tidak lulus juga meningkat menjadi 523 siswa.

Persentase kelulusan di jenjang pendidikan SLTA di tahun 2008 mencapai 95,43 persen dengan jumlah siswa yang tidak lulus sebesar 287 siswa. Kondisi di tahun 2009 tingkat kelulusan siswa mengalami penurunan menjadi 90,94 persen, seiring dengan peningkatan jumlah siswa yang tidak lulus menjadi sebanyak 403 siswa. Persentase kelulusan siswa kembali membaik di tahun 2010 menjadi 91,34 persen, kendati jumlah siswa yang tidak lulus mengalami peningkatan menjadi 464 siswa.

3.3.8 Fasilitas pendidikan

Keberhasilan dalam kegiatan pendidikan tidak semata-mata proses transfer ilmu pengetahuan satu arah yang dilakukan oleh seorang guru dengan hanya menerangkan mata pelajaran dan menuliskannya di atas papan tulis. Diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang dapat membuat siswa yang dididik merasa nyaman dan mudah dalam menerima proses belajar mengajar.

Di era moderen dewasa ini sekolah-sekolah mulai menata diri dengan melengkapi fasilitas sekolah dengan perpustakaan dan laboratorium-laboratorium. Perpustakaan adalah gudang ilmu yang

didalamnya tersimpan buku-buku yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan para siswa. Perpustakaan tidak hanya berisi buku-buku referensi yang dapat dipakai untuk menunjang aktivitas kegiatan belajar mengajar namun juga tersedia sumber-sumber bacaan yang dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan.

Fasilitas lainnya yang juga penting adalah laboratorium. Untuk mengembangkan *skill* dan daya kreasi siswa, laboratorium dapat dipakai untuk melakukan eksperimen dan penelitian. Untuk menambah kemampuan berbahasa terdapat laboratorium bahasa. Untuk menambah kemampuan mengoperasikan komputer dengan *software-software* tertentu dan internet diperlukan fasilitas laboratorium komputer yang memadai.

Tabel 3.18 Persentase Fasilitas Perpustakaan Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	SLTP			SLTA		
	Sekolah	perpustakaan	%	Sekolah	perpustakaan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	128	49	38,28	48	28	58,33
2008	133	54	40,60	50	27	54,00
2009	164	31	18,90	56	27	48,21
2010	158	57	36,08	61	27	44,26

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Berdasarkan Tabel 3.18 meskipun mengalami perkembangan jumlah, fasilitas perpustakaan untuk jenjang pendidikan SLTP hanya dimiliki oleh kurang dari setengah total sekolah yang ada. Semula

pada tahun 2008 fasilitas perpustakaan ada sebanyak 54 buah (40,60 persen). Kemudian fasilitas perpustakaan tersebut berkurang menjadi 31 buah (18,90 persen) pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010, fasilitas tersebut kembali bertambah menjadi 57 buah (36,08 persen).

Secara proporsi fasilitas perpustakaan di jenjang pendidikan SLTA dapat dikatakan lebih baik dari pada di SLTP. Pada tahun 2008 jumlah fasilitas perpusatakaan hanya berjumlah 27 unit (54,00%). Di tahun 2009 dan 2010 jumlah perpustakaan tidak mengalami perubahan, namun persentasenya semakin menurun seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah menjadi 56 unit (48,21%) di tahun 2009 dan 61 unit (44,26%) di tahun 2010.

Sangat disayangkan bahwa pada tahun 2009 fasilitas yang ada berkurang. Diduga karena penggunaan faslilitas tersebut dinilai kurang efektif dan di sisi lain masih terasa kurangnya fasilitas kelas maka ada beberapa sekolah yang mengkonversi faslilitas perpustakaan menjadi kelas. Minimnya jumlah fasilitas perpustakaan dan apakah kondisi fasilitas tersebut memadai dari sisi tempat, jumlah buku, jumlah judul buku dan kualitas buku yang dikoleksi seharusnya menjadi perhatian utama karena fasilitas tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Disamping itu minat baca siswa juga tidak dapat diketahui dengan pasti. Akan sangat disayangkan bila ada fasilitas perpustakaan yang baik tetapi minat baca siswanya rendah.

Tabel 3.19 Persentase Fasilitas Laboratorium Terhadap Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

Tahun	SLTP			SLTA		
	Sekolah	Laboratorium	%	Sekolah	Laboratorium	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	128	21	16,41	48	45	93,75
2008	133	30	22,56	50	58	116,00
2009	164	45	27,44	56	56	100,00
2010	158	103	65,19	61	63	103,28

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010

Selama tahun 2007-2009 di jenjang pendidikan SLTP terlihat sebuah keadaan yang memprihatinkan dari sisi kondisi fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh sekolah. Dari tahun 2007-2009 jumlahnya memang semakin meningkat. Semula pada tahun 2007 dari 128 sekolah, 21 diantaranya mempunyai fasilitas laboratorium. Kemudian pada tahun 2008 jumlahnya bertambah menjadi 30 laboratorium atau sebesar 22,56 persen. Pada tahun 2009 jumlah fasilitas laboratorium mengalami peningkatan menjadi 45 buah (27,44%). Namun keadaan berubah sejak tahun 2010. Jumlah laboratorium meningkat sangat signifikan menjadi 103 unit (65,19 %). Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah karena masih ada sekitar 34,81 persen sekolah yang belum memiliki laboratorium.

Situasi yang berbeda terjadi pada jumlah fasilitas laboratorium di jenjang pendidikan SLTA. Jumlah laboratorium di SLTA mengalami peningkatan menjadi 58 unit dari 50 sekolah SLTA (116,00%) pada tahun 2008. Sementara di tahun 2010, jumlah SLTA yang memiliki laboratorium meningkat menjadi 63 unit, meskipun persentasenya turun menjadi 103,28 persen.

3.4 Kondisi Perekonomian

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor.

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Total PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2010 sebesar Rp. 22,53 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 8,69 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun 2010 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2009 yaitu Rp. 17,21 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,85 triliun atas dasar harga konstan 2000.

Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2010 mencapai Rp. 13,70 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 5,74 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 12,01 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 5,37 triliun atas dasar harga konstan.

Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 8,83 triliun atau sekitar 39,20 persen terhadap total PDRB. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB Papua Barat sangat signifikan.

PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2010 tertinggi berada di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 6,11 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan dengan migas PDRB tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 2,11 triliun.

Tabel 3.20 PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	1,483,373.62	639,868.10	1,483,373.62	639,868.10
Kaimana	859,730.25	393,389.57	859,730.25	393,389.57
Teluk Wondama	371,194.91	180,104.60	371,194.91	180,104.60
Teluk Bintuni	4,763,235.20	2,115,263.85	1,234,367.44	601,647.51
Manokwari	3,066,016.10	1,197,341.58	3,066,016.10	1,197,341.58
Sorong Selatan	392,841.54	177,864.63	392,841.54	177,864.63
Sorong	6,113,735.00	1,849,598.49	1,393,418.64	696,708.13
Raja Ampat	1,129,673.30	540,747.12	567,756.77	260,222.17
Tambrau	36,384.46	17,005.83	36,384.46	17,005.83
Maybrat	186,118.94	81,479.77	186,118.94	81,479.77
Kota Sorong	3,109,599.29	1,529,577.30	3,109,599.29	1,529,577.30
Papua Barat (2010)	22,527,364.81	8,685,647.99	13,696,928.73	5,738,616.35
Papua Barat (2009)	17,214,137.63	6,848,555.91	12,031,519.15	5,371,731.90
Papua Barat (2008)	13,975,126.50	6,399,528.24	9,778,948.46	4,988,450.82

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2010

Sementara bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB, maka di tahun 2010, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong masing-masing Rp. 3,11 triliun dan Rp. 1,53 triliun. PDRB tahun 2010 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempati oleh Kabupaten Tambrauw dengan besaran PDRB Rp. 36,38 miliar dan Rp. 17,01 miliar.

3.4.2 Struktur Ekonomi Regional

Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor. Struktur ini memperlihatkan sektor-sektor utama yang berkontribusi besar dalam perekonomian.

Pada tahun 2010, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat sebesar 35,45 persen. Kemudian sektor pertanian memberikan kontribusi 20,71 persen, sektor pertambangan dan penggalian menyumbangkan 10,22 persen, dan sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap PDRB masing-masing kurang dari 10 persen.

Berdasarkan Tabel 3.20 terdapat tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi masing-masing diatas 10 persen terhadap total PDRB dari tahun 2008-2010. Keempat sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan-penggalian. Sektor pertanian selalu memberikan kontribusi terbesar PDRB dari tahun 2000-2008 dan berangsur-angsur mengalami penurunan, namun di tahun 2009 dan 2010 sektor industri

pengolahan menjadi kontributor utama dalam distribusi PDRB Papua Barat. Di tahun 2009 dan 2010 industri pengolahan memberikan *share* 24,71 persen dan 35,45 persen.

Tabel 3.21 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	24,83	24,40	20,71
Pertambangan dan Penggalian	14,80	13,18	10,22
Industri Pengolahan	22,64	24,71	35,45
Listrik, Gas & Air Bersih	0,53	0,51	0,43
Bangunan	9,36	9,75	9,03
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,33	9,94	8,38
Pengangkutan dan Komunikasi	6,93	7,25	6,38
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,43	2,38	2,18
Jasa-jasa	8,15	7,88	7,23
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2010

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian menjadi tiga besar kontributor selama tahun 2000-2010, serta memiliki pola kontribusi yang sama dengan sektor pertanian. Sektor pertambangan dan penggalian juga terus mengalami penurunan persentase sumbangan terhadap PDRB Papua Barat.

Sektor industri pengolahan selalu konsisten memberikan kontribusi terbesar kedua selama tahun 2004-2008, bahkan persentase sumbangan terhadap PDRB terus mengalami

peningkatan. Kontribusi sektor industri pengolahan menjadi yang utama sejak tahun 2009 menggeser sektor pertanian. Kontribusi sektor ini di tahun 2008 sebesar 22,64 persen, kemudian tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 24,71 persen. Pada tahun 2010 kontribusi sektor ini mengalami peningkatan luar biasa menjadi 35,45 persen. Besarnya peran sektor industri pengolahan sejak 2009 dipicu oleh mulai beroperasinya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penurunan secara berangsur-angsur kontribusi sektor pertanian dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan jasa-jasa di dalam memberikan nilai tambah pada PDRB menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier.

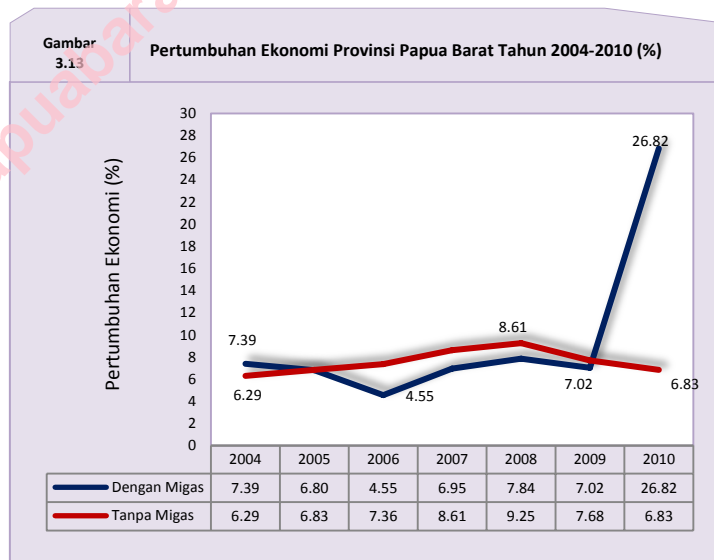
3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2010 dengan migas sebesar 26,82 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan luar biasa jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008 yaitu sebesar 7,02 persen dan 7,84 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 ini merupakan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Hal ini dipicu oleh

telah beroperasinya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni yang mulai beroperasi sekitar akhir tahun 2009 dan mulai dioptimalkan produksinya pada tahun 2010. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun PDRB dengan migas dari tahun 2004-2010 sebesar 9,75 persen.

Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2010 sebesar 6,83 persen. Kondisi ini justru mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 7,68 persen maupun tahun 2008 yang mencapai 9,25 persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 2004-2010 tanpa migas di Papua Barat mencapai 7,76 persen. Jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang sangat signifikan tersebut dipengaruhi oleh subsektor migas.



3.4.4 PDRB per Kapita

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB telah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

PDRB per kapita Papua Barat dengan migas tahun 2010 mencapai Rp. 29,62 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 11,42 juta atas dasar harga konstan 2000. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2009 sebesar Rp. 23,40 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 9,31 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB per kapita Papua Barat tanpa migas tahun 2010 mencapai Rp. 18,01 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 7,55 juta atas dasar harga konstan 2000. Kondisi tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp. 16,35 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 7,30 juta atas dasar harga konstan 2000.

PDRB per kapita dengan migas tertinggi menurut kabupaten/kota berdasarkan Tabel 3.22 adalah Kabupaten Teluk Bintuni yakni sebesar Rp 90,86 juta atas dasar harga berlaku dan Rp 40,35 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB per kapita tanpa migas tertinggi juga berada di Kabupaten Teluk Bintuni

yakni mencapai Rp. 23,55 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 11,48 juta atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 3.22 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	22,20	9,57	22,20	9,57
Kaimana	18,59	8,51	18,59	8,51
Teluk Wondama	14,10	6,84	14,10	6,84
Teluk Bintuni	90,86	40,35	23,55	11,48
Manokwari	16,33	6,38	16,33	6,38
Sorong Selatan	10,37	4,69	10,37	4,69
Sorong	36,57	26,19	19,73	9,87
Raja Ampat	26,58	12,72	13,36	6,12
Tambrauw	5,92	2,77	5,92	2,77
Maybrat	5,63	2,46	5,63	2,46
Kota Sorong	16,31	8,02	16,31	8,02
Papua Barat (2010)	29,62	11,42	18,01	7,55
Papua Barat (2009)	23,40	9,31	16,35	7,30
Papua Barat (2008)	19,69	9,02	13,78	7,03

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2010

Sedangkan PDRB per kapita dengan migas terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 5,63 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 2,46 juta atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor minyak dan gas (tanpa migas) PDRB per kapita terendah masih tetap ditempati Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 5,63 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 2,46 juta atas dasar harga konstan 2000.

PDRB per kapita Kabupaten Teluk Bintuni merupakan yang tertinggi di Papua Barat, yaitu sebesar Rp. 90, 86 juta per tahun. Artinya rata-rata PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 7,57 juta per bulan. Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Maybrat yang merupakan PDRB per kapita terendah (Rp. 5,63 juta) memiliki rata-rata Rp. 0,4 juta per bulan. Kesenjangan yang sangat nyata tampak dari kondisi ini. Dimana *gap* antara daerah dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendah sangat jauh, yakni mencapai Rp. 85,23 juta per tahun.

<http://papuabarat.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN KOMPONEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2008-2010

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Sedangkan komponen-komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Kemajuan ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat.

Mulai tahun 2009, penghitungan IPM 2009 telah menyertakan dua kabupaten pemekaran baru, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Kabupaten Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten

Sorong, sedangkan Kabupaten Maybrat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian di tahun 2009 ini hasil pembangunan manusia yang terukur melalui IPM di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi sepuluh kabupaten dan satu wilayah kota.

Dalam pemekaran wilayah terdapat kemungkinan kabupaten pemekarannya lebih maju dibandingkan dengan kabupaten induknya atau sebaliknya. Dimungkinkan pula tingkat disparitasnya, sangat memungkinkan antara kabupaten yang dimekarkan jauh tertinggal dari kabupaten induknya.

4.1. Perkembangan Kesehatan

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Di tahun 2010, angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 68,51 tahun artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup selama 68 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 71,95 tahun dan angka harapan hidup terendah di Kabupaten Tambrau sebesar 66,15 tahun.

Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2009-2010 Provinsi Papua Barat tercatat hanya mengalami kemajuan 0,31 tahun selama satu tahun. Peningkatan angka harapan

hidup tertinggi terjadi di Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong sebesar 0,42 tahun dalam waktu satu tahun. Peningkatan angka harapan hidup terendah sebesar 0,17 tahun terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Perkembangan angka harapan hidup di Papua Barat di tahun 2009-2010 mengalami peningkatan yang hampir sama seperti di tahun 2008-2009 yaitu mengalami perubahan 0,30-0,31 tahun selama satu tahun. Peningkatan tertinggi AHH untuk dua tahun terakhir terjadi di Kota Sorong sebesar 0,83 tahun, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan memiliki kemajuan peningkatan AHH terkecil yaitu sebesar 0,33 tahun.

Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	69,81	70,16	70,52
Kaimana	69,26	69,48	69,65
Teluk Wondama	67,00	67,25	67,51
Teluk Bintuni	67,55	67,88	68,21
Manokwari	67,38	67,67	68,00
Sorong Selatan	66,33	66,49	66,66
Sorong	67,12	67,49	67,85
Raja Ampat	65,43	65,75	66,17
Tambrau	-	66,09	66,15
Maybrat	-	66,03	66,33
Kota Sorong	71,12	71,53	71,95
Papua Barat	67,90	68,20	68,51

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Provinsi Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka

waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

4.2. Perkembangan Pendidikan

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini dalam membentuk komponen pendidikan yaitu dua per tiga bagian adalah angka melek huruf dan sepertiga bagian adalah rata-rata lama sekolah.

4.2.1. Perkembangan Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2010 mencapai 93,19 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 92,34 persen dan 92,15 persen. Selama tahun 2009-2010 angka melek huruf Papua Barat mengalami peningkatan 0,85 persen, sedangkan selama periode 2007-2009 meningkat sebesar 1,04 persen.

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu tiga tahun Kota Sorong memiliki angka melek huruf tertinggi diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 99,10 persen; 99,12 persen; dan 99,13 persen. Angka melek huruf Kota Sorong mengalami stagnasi karena AMH Kota Sorong sudah tergolong dalam AMH tinggi sehingga sangat sulit untuk mengalami peningkatan. Hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada penduduk usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	97,17	97,18	97,46
Kaimana	95,48	95,49	95,50
Teluk Wondama	82,85	83,13	84,05
Teluk Bintuni	82,67	82,98	85,90
Manokwari	85,37	85,67	87,79
Sorong Selatan	88,07	88,20	88,32
Sorong	91,39	91,40	91,69
Raja Ampat	92,69	92,77	93,62
Tambrauw	-	76,38	77,15
Maybrat	-	89,80	90,73
Kota Sorong	99,10	99,12	99,13
Papua Barat	92,15	92,34	93,19

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

Sementara angka melek huruf terendah selama kurun waktu dua tahun terakhir berada di Kabupaten Tambrauw, yakni masing-masing sebesar 76,38 persen (2009) dan 77,15 persen (2010). Selain rendah, angka melek huruf Kabupaten Tambrauw

juga tertinggal jauh dengan kabupaten/kota lainnya. Jarak terdekat AMH adalah dengan Kabupaten Teluk Wondama, itupun dengan selisih 6,90 persen. Diperlukan usaha keras untuk mengejar ketertinggalan ini, karena dengan *gap* 6,90 persen mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Rendahnya angka melek huruf di kabupaten ini diduga oleh minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan, serta sulitnya akses transportasi ke pemukiman penduduk yang sebagian besar masih tinggal di tempat terpencil.

4.2.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Barat rendah maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua bergerak sangat lambat. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat mencapai 8,21 tahun atau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,21 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2009. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2008, angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,54 tahun dalam kurun waktu dua tahun.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,21 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTP atau putus sekolah pada kelas 3 SLTP. Kondisi ini bahkan hampir dapat

dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode tahun 2008-2010.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	8,93	9,09	9,27
Kaimana	7,10	7,32	7,55
Teluk Wondama	6,39	6,44	6,61
Teluk Bintuni	6,85	6,88	6,90
Manokwari	7,59	7,95	8,37
Sorong Selatan	7,90	7,94	7,98
Sorong	8,00	8,04	8,06
Raja Ampat	7,00	7,26	7,35
Tambrau	-	4,21	5,74
Maybrat	-	6,92	7,78
Kota Sorong	10,52	10,54	10,59
Papua Barat	7,67	8,01	8,21

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 4.3, di tahun 2010, Kota Sorong mempunyai rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rata-rata lama sekolah di Kota Sorong mencapai 10,59 tahun, atau rata-rata penduduk Kota Sorong mampu mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Sementara rata-rata lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Tambrau sebesar 5,74 tahun. Di kabupaten ini rata-rata penduduk hanya mampu bersekolah sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah setelah kelas 6 SD.

4.3. Perkembangan Paritas Daya Beli

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Untuk itu dalam penghitungan daya beli ini telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Hasil penghitungan paritas daya beli ini juga telah di-*deflate* dengan IHK tahun 1989, jadi nilai paritas daya beli sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan paritas daya beli seperti yang ditampilkan. Penggunaan IHK 1989 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan kesamaan metodologi dengan tahun-tahun sebelumnya mulai dari pertama kali IPM dihitung oleh BPS, sehingga dapat diperbandingkan antar waktu meskipun tahun dasar penghitungan inflasi terbaru menggunakan tahun dasar tahun 2007. Tujuan dari pendeblasian harga adalah supaya daya beli ini tidak terpengaruh oleh perubahan harga, sehingga harus dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun dasar tertentu.

Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2010 adalah sebesar Rp. 596.080,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp. 595.280,-. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun 2008 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar Rp. 593.130,-. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk sehingga dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

**Tabel 4.4 Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010
(Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	582,51	585,63	589,06
Kaimana	596,37	599,40	600,31
Teluk Wondama	597,65	600,79	601,00
Teluk Bintuni	596,30	597,49	598,46
Manokwari	584,87	588,11	588,30
Sorong Selatan	585,70	587,90	588,85
Sorong	596,11	597,45	598,18
Raja Ampat	558,87	560,49	560,70
Tambrauw	-	440,53	441,15
Maybrat	-	580,93	582,12
Kota Sorong	633,78	634,63	635,48
Papua Barat	593,13	595,28	596,08

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

Menurut Tabel 4.4, Kota Sorong mempunyai paritas daya beli tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu Rp. 633,78 ribu (2008); Rp. 634,63 ribu (2009); dan Rp. 635,48 ribu (2010). Sementara Kabupaten Raja Ampat memiliki paritas daya beli terendah pada tahun 2008, yaitu Rp. 558,87 ribu. Sedangkan untuk tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten yang memiliki paritas daya beli terendah yaitu sebesar Rp. 440,53 ribu dan Rp. 441,15 ribu.

Kenaikan paritas daya beli Provinsi Papua Barat ternyata juga diikuti oleh kenaikan indeks daya beli. Indeks daya beli pada tahun 2010 Provinsi Papua Barat sebesar 54,56, atau kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan indeks daya beli tahun 2009 dan 2008 yang masing-masing mempunyai nilai indeks sebesar 54,37 dan 53,88 (lihat lampiran 7).

4.4. Perkembangan IPM

Secara umum besarnya capaian IPM Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan daerah tingkat II di Provinsi Papua Barat tidak satupun yang mengalami penurunan angka IPM. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2009 dua kabupaten telah dapat dihitung besaran IPM-nya, yaitu Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Sebenarnya kedua kabupaten ini telah resmi menjadi daerah otonom sebelum tahun 2009, namun

sufficiency sample baru dapat tercapai tahun 2009 dan penghitungan pun dapat dilakukan.

Tabel 4.5 IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	IPM			Perubahan (poin)		
	2008	2009	2010*	2008-2009	2009-2010	2008-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fak-Fak	70,24	70,80	71,46	0,56	0,65	1,22
Kaimana	69,27	69,80	70,13	0,53	0,33	0,86
Teluk Wondama	64,79	65,27	65,76	0,48	0,49	0,97
Teluk Bintuni	65,29	65,65	66,58	0,36	0,93	1,29
Manokwari	65,46	66,20	67,19	0,74	0,98	1,73
Sorong Selatan	65,77	66,09	66,31	0,32	0,22	0,54
Sorong	67,82	68,16	68,50	0,34	0,34	0,68
Raja Ampat	63,57	64,08	64,58	0,51	0,50	1,01
Tambrauw	-	49,12	50,51	-	1,39	-
Maybrat	-	64,89	66,00	-	1,10	-
Kota Sorong	76,52	76,84	77,18	0,32	0,34	0,66
Papua Barat	67,95	68,58	69,15	0,63	0,57	1,20

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2008 sebesar 67,95, kondisi ini mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 68,58 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,63 poin selama setahun. Di tahun 2010 IPM Provinsi Papua Barat kembali mengalami peningkatan sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan tahun 2009 menjadi 69,15. Jadi peningkatan capaian IPM 2009-2010 lebih rendah dari pada capaian IPM 2008-2009. Peningkatan capaian IPM Papua Barat masih dapat dipacu lebih cepat lagi dengan program-program pembangunan yang tepat sasaran, mengingat posisi IPM Papua masih berada pada kategori menengah, sehingga lebih mudah untuk ditingkatkan.

Dari hasil capaian IPM, Kota Sorong menduduki peringkat terbaik di Papua Barat tahun 2008-2010. Capaian nilai IPM jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Barat. Capaian IPM Kota Sorong berturut-turut 76,52 (2008); dan 76,84 (2009); 77,18 (2010). Sementara Kabupaten Raja Ampat selama tahun 2008 selalu menjadi peringkat terakhir dalam ranking capaian IPM Provinsi Papua Barat yaitu 63,87 (2008). Namun di tahun 2009 dan 2010, Kabupaten Tambrauw berada pada urutan terakhir dengan besaran IPM 49,12 dan 50,51. Capaian tersebut menurut UNDP termasuk dalam kategori rendah yaitu di kisaran dibawah atau sekitar 50,00.

Hasil capaian IPM setiap kabupaten/kota setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan capaian IPM bervariasi setiap daerah. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya pertumbuhannya terkesan lambat.

Di tahun 2008-2009, tidak satupun kabupaten/kota yang memperoleh capaian IPM diatas satu digit dalam waktu satu tahun. Peningkatan tertinggi hanya sebesar 0,74 poin dalam waktu satu tahun yang dicapai oleh Kabupaten Manokwari. Meskipun selalu tumbuh positif namun delapan dari sembilan kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan terhadap periode sebelumnya. Termasuk yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah capaian IPM Provinsi Papua Barat. Kabupaten Kaimana adalah satu-satunya yang tidak mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kabupaten ini mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,47 poin di periode 2007-2008 menjadi 0,53 poin di periode 2008-2009.

Pada tahun 2009-2010, diantara kabupaten/kota tersebut yang memiliki pertumbuhan yang relatif cepat adalah Kabupaten Tambrauw (1,39 poin) dan Kabupaten Maybrat (1,10 poin). Sementara kabupaten/kota lainnya memiliki pertumbuhan capaian IPM dibawah satu digit. Dua kabupaten pemekaran terbaru memiliki pertumbuhan yang tertinggi diduga karena dengan pemerintahan yang baru diperlukan kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten induknya.

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode 2008-2010, Kabupaten Manokwari memiliki pertumbuhan capaian IPM yang tertinggi yaitu mencapai 1,73 poin. Sejak menjadi ibukota Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari menunjukkan performa yang baik. Capaian tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni (1,29 poin) dan Kabupaten Fakfak (1,22 poin).

Kecenderungan pencapaian komponen-komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah memiliki komponen yang sudah tinggi atau mendekati nilai maksimum.

Pada penjelasan di atas terlihat bahwa besaran IPM Provinsi Papua Barat dipresentasikan besaran IPM keseluruhan kabupaten/kota. Oleh karena itu, besar atau kecilnya besaran IPM kabupaten/kota sangat mempengaruhi besaran IPM provinsi.

Jika selama periode tahun 2008-2010 besaran IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan besaran IPM provinsi, maka terdapat dua kabupaten/kota yang besarnya relatif lebih tinggi terhadap IPM Provinsi Papua Barat. Kedua kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong.

4.5. Reduksi *Shortfall*

Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100 persen), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Pada tahun 2007-2008 reduksi *shortfall* Papua Barat mencapai 2,05 persen. Pada tahun 2008-2009 reduksi *shortfall* Provinsi Papua Barat mengalami perlambatan menjadi 1,95 persen. Dan reduksi *shortfall* Papua Barat kembali mengalami perlambatan menjadi 1,81 persen pada periode 2009-2010.

Reduksi *shortfall* kabupaten/kota pada tahun 2009-2010 bervariasi besarnya. Peringkat tiga besar reduksi *shortfall* ditempati oleh dua kabupaten pemekaran terbaru dan ibukota provinsi. Kabupaten Maybrat memiliki reduksi *shortfall* yang paling tinggi untuk periode ini, yaitu mencapai 3,14 persen. Kemudian disusul Kabupaten Manokwari di peringkat kedua dengan capaian sebesar 2,91 persen. Kabupaten Tambrau memiliki capaian reduksi *shortfall* tertinggi ketiga yaitu sebesar 2,73 persen.

Pada periode 2008-2009 reduksi *shortfall* Papua Barat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di periode ini reduksi *shortfall* Papua Barat melambat menjadi 1,95 persen. Sebaran reduksi *shortfall* pada periode ini lebih merata antar kabupaten/kota. Reduksi

shortfall berada pada kisaran 0,92-2,15 persen dengan capaian tertinggi di Kabupaten Manokwari dan terendah berada di Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai ibukota provinsi, Kabupaten Manokwari terus berbenah diri dan mulai mengejar ketertinggalan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Manokwari di periode ini merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki reduksi *shortfall* diatas dua persen.

Seperti halnya pada reduksi *shortfall* tahun 2008-2009, pada periode tahun 2009-2010 reduksi *shortfall* juga mengalami perlambatan, dari 1,95 persen menjadi 1,81 persen. Seluruh kabupaten/kota memiliki reduksi *shortfall* diatas satu persen kecuali Kabupaten Sorong Selatan (0,66 persen). Disamping itu, kabupaten ini selalu dalam peringkat terakhir urutan reduksi *shortfall* atau merupakan daerah paling lambat berkembang dalam pembangunan manusia.

Tabel 4.6 Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	2007-2008	2008-2009	2009-2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	2,16	1,89	2,24
Kaimana	1,50	1,72	1,11
Teluk Wondama	3,79	1,36	1,40
Teluk Bintuni	2,48	1,05	2,70
Manokwari	3,58	2,15	2,91
Sorong Selatan	1,13	0,94	0,66
Sorong	1,88	1,04	1,08
Raja Ampat	2,93	1,40	1,40
Tambrau	-	-	2,73
Maybrat	-	-	3,14
Kota Sorong	3,83	1,34	1,47
Papua Barat	2,05	1,95	1,81

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

BAB V DISPARITAS IPM ANTAR WILAYAH

Paradigma pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian para pembuat kebijakan. Pemerintah daerah kini tidak lagi hanya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi semata. Pengalaman beberapa negara yang telah sukses, keberhasilan pembangunan manusia biasanya juga akan diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan manusia tentunya sangat terkait dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar dan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendatangkan permasalahan dalam kinerja pembangunan manusia karena yang dibangun adalah manusia atau penduduk. Jadi ketika jumlah penduduk besar atau pertumbuhan penduduknya tinggi maka penanganan dalam pembangunan manusia yang mempunyai objek pembangunan manusia/penduduk akan lebih kompleks dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah.

Provinsi Papua Barat memiliki salah satu dari permasalahan tersebut, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam periode tahun 2000-2010 Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk tertinggi keempat di Indonesia yaitu 3,71 persen per tahun. Sebagai daerah yang “baru”, Provinsi Papua Barat adalah provinsi termuda di Indonesia. Dengan predikat sebagai daerah yang termuda tentu saja provinsi ini sedang dalam kondisi membangun

secara pesat karena harus mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya.

Secara ekonomi, pembangunan Papua Barat tergolong cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi dengan migas di tahun 2010 yang mencapai 26,82 persen (tertinggi di Indonesia). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional hanya mencapai 6,10 persen pada tahun yang sama. Lantas bagaimana kondisi pembangunan manusia Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota diantara provinsi-provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia?

Sebelum membahas kondisi maupun posisi Papua Barat dan kabupaten/kotanya terhadap daerah lainnya di Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu kondisi antar wilayah di Provinsi Papua Barat.

5.1 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Posisi relatif IPM kabupaten/kota di sini adalah keterbandingan relatif antar masing-masing besaran IPM kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat pada tahun 2008-2010.

Adapun posisi relatif masing-masing IPM kabupaten/kota akan diukur melalui kesamaan capaian IPM atau dengan mengukur jarak posisi IPM terhadap suatu besaran relatif yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada gambar boxplot berikut ini akan memberikan gambaran sebaran angka IPM Provinsi Papua Barat 2007-2010. Gambar tersebut menunjukkan apakah sebaran IPM antar wilayah telah terdistribusi dengan baik dan mempunyai sebaran yang relatif homogen.

Kotak pada boxplot memuat 50 persen data atau mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75 sedangkan garis yang ada ditengah kotak adalah nilai median data (nilai tengah). Rata-rata IPM tahun 2008 adalah

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010

paling tinggi, kemudian disusul oleh IPM tahun 2007, 2010 dan 2009. Hal ini ditunjukkan oleh tanda titik di dalam kotak tahun 2008 yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2007, 2010 dan 2009.

Untuk melihat sebaran IPM antar kabupaten/kota dapat diketahui dari gambar boxplot. Bila tanda garis horizontal di dalam kotak tepat persis berada ditengah boxplot, distribusi dapat dikatakan normal atau sebaran IPM antar kabupaten/kota merata. Jika garis horizontal ada disisi agak keatas tandanya distribusi menceng ke kiri dan sebaliknya bila garis horizontal berada agak ke bawah, tandanya distribusi menceng ke kanan. Semakin tanda garis horizontal mendekati atap atau alas boxplot maka kemencengan distribusi semakin ekstrim dan sebaran semakin tidak merata.

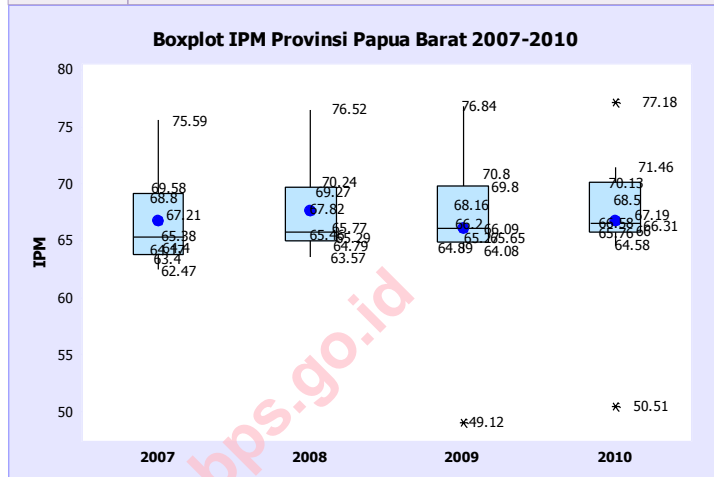
Dari keempat boxplot (IPM 2007-2010) terlihat bahwa posisi garis pada boxplot berada disebelah agak kebawah. Sehingga dapat dikatakan sebaran IPM Papua Barat dari tahun 2007-2010 mempunyai distribusi menceng ke kanan. Artinya sebagian besar IPM kabupaten/kota berada dibawah nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.

Dari sebaran capaian nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terdapat dua kabupaten/kota yang nilainya ekstrim dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kedua daerah tersebut adalah Kota sorong dan Kabupaten Tambrauw. Kota Sorong memiliki nilai ekstrim jauh diatas capaian kabupaten lainnya. Sedangkan Kabupaten Tambrauw ekstrim karena jauh dibawah kabupaten/kota lainnya.

Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Bila dilihat dari infrastruktur wilayah, daerah ini memang sangat jauh tertinggal. Akses untuk menuju distrik-distriknya pun relatif sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.

Gambar 5.1

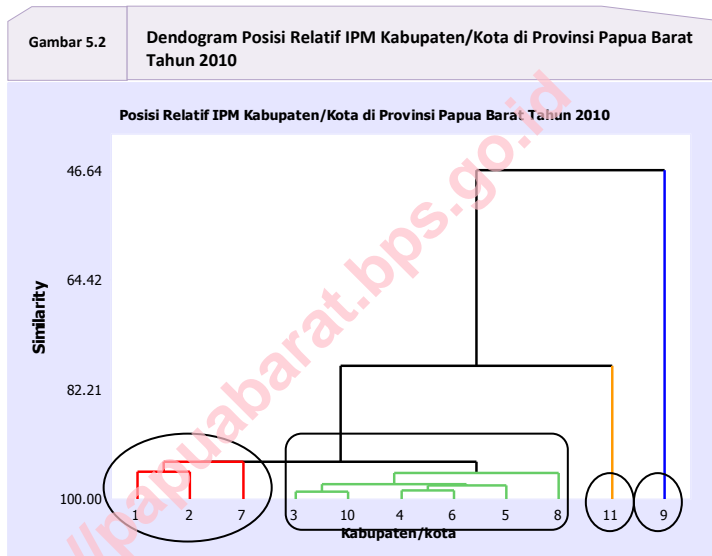
Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010



Posisi relatif IPM lainnya dapat diketahui dari kesamaan capaian yang telah diraih oleh masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM yang relatif sama dapat digabungkan ke dalam satu kelompok. Melalui proses ini diharapkan dapat membentuk lebih dari satu kelompok capaian IPM kabupaten/kota, sehingga nantinya dapat berguna untuk melihat posisi relatif capaian IPM.

Dilihat berdasarkan kesamaan capaian IPM, posisi relatif kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok IPM bawah. Kelompok ini terdiri dari Kabupaten Tambrauw (9), dengan capaian IPM hanya 50,51. Kelompok kedua adalah kelompok menengah bawah, yaitu Kabupaten Manokwari (5), Sorong Selatan (6), Teluk Bintuni (4), Teluk Wondama (3), Maybrat (10), dan Raja Ampat (8). Capaian rata-rata IPM di keenam kabupaten tersebut 67,5 kebawah. Kelompok ketiga adalah kelompok menengah

menengah yang terdiri dari Kabupaten Fakfak (1), Kaimana (2) dan Sorong(7). Capaian IPM di ketiga kabupaten ini antara 67,5 hingga 75. Sedangkan Kelompok yang terakhir adalah kelompok menengah atas adalah IPM Kota Sorong (9). Capaian IPM Kota Sorong berada pada kisaran 75-80.



Dari empat kelompok tersebut, kelompok pertama terdiri dari Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong. Terlihat disini Kabupaten Kaimana yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak ternyata mampu mengikuti perkembangan daerah induknya dan mempunyai kesamaan ciri dengan daerah induknya. Sementara Kabupaten Sorong yang merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat ternyata masih terlalu jauh posisinya dan mempunyai perbedaan ciri dari kabupaten pemekarannya.

Kabupaten ini justru lebih mempunyai kesamaan ciri capaian IPM dengan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Kelompok kedua terdiri dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Maybrat dan Raja Ampat. Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang 'serumpun'. Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Ternyata capaian IPM ketiga kabupaten ini masih memiliki kesamaan ciri. Kelompok kedua ini ditambah dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat yang masih tertinggal dari kabupaten induknya, Kabupaten Sorong. Kedua kabupaten tersebut justru memiliki kesamaan ciri dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong. Sedangkan Kabupaten Maybrat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan ternyata masih memiliki kesamaan ciri dengan kabupaten induknya dan masuk kedalam kelompok yang sama.

Kelompok ketiga hanya terdiri dari Kota Sorong. Sebagai daerah yang memiliki status wilayah administrasi sebagai satu-satunya kota, tentunya Kota Sorong lebih maju dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kemajuan ini ternyata diikuti pula oleh kemajuan pembangunan manusianya. Sehingga Kota Sorong menjadi daerah di Papua Barat yang memiliki angka IPM tertinggi dan mempunyai perbedaan ciri dengan kabupaten lainnya.

Kelompok yang keempat ditempati sendiri oleh Kabupaten Tambrauw. Kabupaten ini sangat berbeda ciri dengan kabupaten/kota lainnya. Capaian IPM Kabupaten Tambrauw juga jauh dibawah wilayah lainnya begitu pula dengan kabupaten induknya.

5.2 Posisi Relatif IPM Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dari hasil capaian IPM tahun 2006-2009 Provinsi Papua Barat selalu ada di posisi urutan ke-30 dari 33 provinsi di Indonesia diatas Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun di tahun 2010, Provinsi Papua Barat naik satu peringkat ke urutan 29 dari 33 provinsi. Provinsi Papua Barat menggeser posisi Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya ada di peringkat diatasnya.

Rendahnya peringkat Provinsi Papua Barat karena posisi kabupaten/kota didalamnya juga relatif rendah. Sebagian besar kabupaten di Papua Barat mempunyai peringkat diatas 400 dari sekitar hampir 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posisi terbaik IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2010 selalu ditempati oleh Kota Sorong dan posisi terburuk ditempati oleh Kabupaten Raja Ampat (2008) dan Kabupaten Tambrau (2009 dan 2010).

Peringkat capaian IPM kabupaten/kota tahun 2010 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2009. Setidaknya ada empat kabupaten yang mengalami pergeseran peringkat. Kabupaten Sorong Selatan yang pada tahun 2009 berada di peringkat ke-6 turun peringkat menjadi urutan ke-7 bertukar posisi dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan peringkat ke-8 yang semula ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama sekarang ditempati oleh Kabupaten Maybrat yang semula berada di peringkat ke-9. Teluk Wondama di tahun 2010 ini turun satu peringkat di urutan ke-9.

Tabel 5.1 IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Nasional		
	2008	2009	2010*	2008	2009	2010*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	70,24	70,80	71,46	244	247	230
Kaimana	69,27	69,80	70,13	304	306	311
Teluk Wondama	64,79	65,27	65,76	441	449	451
Teluk Bintuni	65,29	65,65	66,58	438	446	439
Manokwari	65,46	66,20	67,19	434	437	426
Sorong Selatan	65,77	66,09	66,31	429	439	444
Sorong	67,82	68,16	68,50	367	382	387
Raja Ampat	63,57	64,08	64,58	452	462	463
Tambrauw	-	49,12	50,51	-	489	485
Maybrat	-	64,89	66,00	-	454	448
Kota Sorong	76,52	76,84	77,18	30	30	31
Papua Barat	67,95	68,58	69,15	30	30	29

Sumber: Diolah dari Susenas 2008-2010

*) Angka Sementara

Perkembangan peringkat capaian IPM secara nasional tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat bawah. Tujuh diantara 11 kabupaten/kota memiliki peringkat diatas 400. Sedangkan bila dilihat dari perkembangan peringkat tahun sebelumnya, terdapat fakta yang ironis, enam dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat peringkat IPM-nya turun dibandingkan tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak secepat kabupaten/kota di provinsi lainnya.

5.3 Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ekonomi yang diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selamanya efisien bila tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata.

Kemunculan paradigma pembangunan manusia seakan memberi pencerahan kepada pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pencapaian kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi juga wajib diperjuangkan. Baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia mestinya berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan akhir yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di Papua Barat dapat diketahui dengan cara membuat diagram kuadran dengan mengkombinasikan capaian nilai IPM sebagai perwakilan keberhasilan pembangunan manusia dan sebagai representasi dari pembangunan ekonomi digunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah atas dasar harga konstan 2000 tanpa menyertakan subsektor migas (tanpa migas) sedangkan PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tanpa migas.

5.3.1 IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Diagram kuadran yang pertama adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan pertumbuhan ekonomi. *Benchmark* yang

digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat.

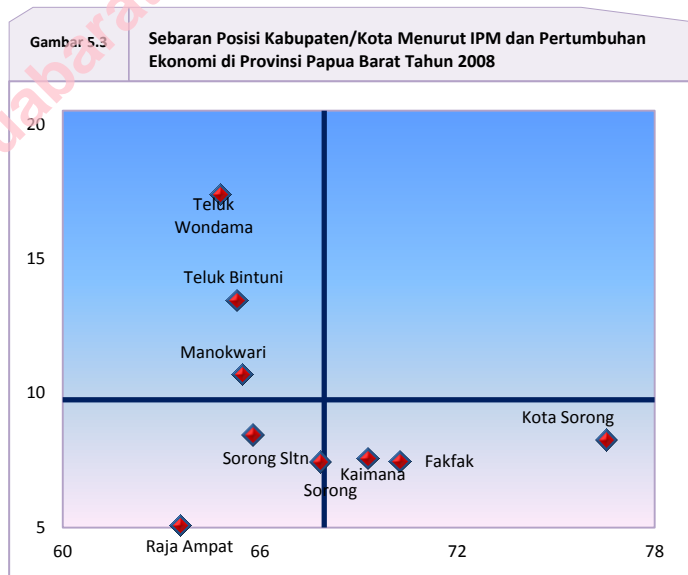
Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (pertumbuhan ekonomi) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

Kuadran I : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Kuadran II : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi

Kuadran III : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah

Kuadran IV : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

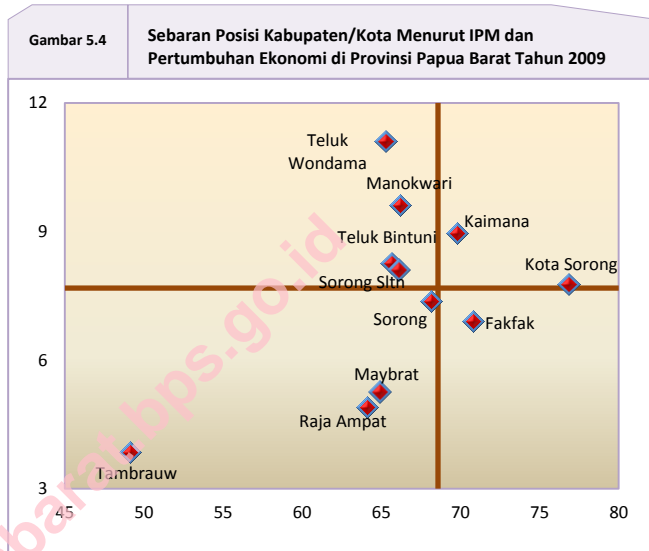


Gambar 5.3 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2008 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2008. Pada kondisi tahun 2008 yang menjadi *starting point* pada analisis ini, tidak satupun kabupaten/kota berada pada kuadran I. Kuadran ini menggambarkan kondisi terbaik suatu wilayah. Kuadran mempunyai ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM tinggi, sehingga dapat dikatakan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi berjalan sinergi dan memperoleh titik optimum.

Posisi di kuadran II yang mempunyai ciri IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi ditempati oleh empat kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Manokwari. Pertumbuhan ekonomi tinggi terutama terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Dua kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Manokwari ini memang sedang berkembang menjadi kabupaten baru yang siap mensejajarkan diri dengan kabupaten induknya.

Di kuadran III, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat berada didalamnya. Dapat dikatakan bahwa kuadran ini adalah kondisi terburuk bagi suatu daerah karena kuadran ini mempunyai ciri capaian IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Jadi pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi keduanya berjalan tidak optimal. Selanjutnya di kuadran IV yang mempunyai karakteristik capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah ditempati oleh Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan Kota Sorong. Di kuadran ini pembangunan manusia

berjalan dengan baik tetapi tidak didukung oleh pembangunan ekonomi yang mumpuni atau pertumbuhannya rendah.



Gambar 5.4 menjelaskan posisi absolut kabupaten/kota tahun 2009 pada diagram kuadran. Di tahun 2009 terjadi perubahan yang signifikan. Kuadran I yang memiliki karakteristik capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi mulai ditempati oleh Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong yang bergeser dari kuadran IV. Kedua daerah tersebut mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi dan berhasil melewati *benchmark* pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat.

Di kuadran II posisinya hampir sama dengan kondisi pada tahun 2008, perbedaannya posisi Kabupaten Sorong Selatan sekarang telah mengalami pergeseran ke kuadran III. Pergeseran

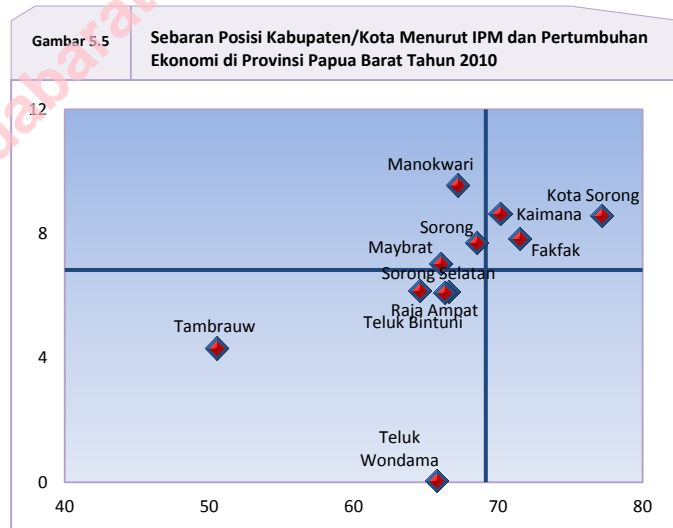
Kabupaten Sorong Selatan disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi *benchmark* disamping oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong Selatan dibandingkan dengan tahun 2008. Di kuadran III masih bertahan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong ditambah dengan dua kabupaten pemekaran baru (Kabupaten Maybrat dan Tambrau).

Kuadran IV pada tahun 2009 Kabupaten Fakfak yang tidak mampu melampaui *benchmark* pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tetap bertahan seperti halnya Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.

Perubahan posisi kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2009 terjadi pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, dan Kota Sorong. Pergeseran posisi ketiga kabupaten/kota ini menuju kondisi yang lebih baik. Artinya salah satu dari indikator berhasil melampaui *benchmark* yang merupakan batas antar kuadran. Sementara enam kabupaten lainnya tidak mampu memperbaiki posisinya karena pertumbuhan ekonomi dan atau pertumbuhan capaian IPM-nya masih kalah tinggi dengan pertumbuhan *benchmark*. Namun yang perlu disyukuri adalah tidak satu pun dari kabupaten/kota mengalami pergeseran pada kuadran dengan kondisi yang lebih buruk.

Di tahun 2009, telah dihitung besarnya capaian IPM Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat. Dua kabupaten ini belum memberikan kontribusi yang cukup dalam hal pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Sebagai kabupaten yang baru, dua kabupaten ini agak tertinggal dibandingkan dengan kabupaten induknya maupun kabupaten lain.

Beberapa perubahan posisi kabupaten/kota dalam diagram kuadran terjadi di tahun 2010. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah berubahnya nilai *benchmark*. Penurunan nilai *benchmark* terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami perlambatan dari 7,68 persen menjadi 6,83 persen. Di tahun 2010 ini, nilai *benchmark* cenderung mengalami penurunan karena masuknya Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw. Masuknya dua kabupaten ini menurunkan nilai *benchmark* karena capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM-nya rendah. Terutama pada Kabupaten Tambrauw, daerah ini capaian IPM-nya hanya 50,51, sedangkan pertumbuhannya hanya mencapai 4,32 persen.



Di tahun 2010 terjadi perubahan pada susunan posisi kuadran-kuadran. Semula di tahun 2009 di kuadran pertama hanya ditempati

oleh Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong, sekarang Kabupaten Fakfak ikut menembus ke kuadran I. Di tahun 2010 Kabupaten Fakfak berhasil memacu pertumbuhan ekonominya dan dapat melampaui *benchmark* pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu bergeser ke kuadran I. Jadi ketiga kabupaten/kota tersebut mengalami perbaikan kondisi dengan ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM tinggi.

Pada kuadran II terjadi sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2008. Di kuadran ini yang semula ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan dan Manokwari, kini Kabupaten Sorong Selatan kembali lagi bergeser ke kuadran III. Pergeseran posisi Kabupaten Sorong Selatan dari kuadran II ke kuadran III terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010. Sejak Kabupaten Maybrat memisahkan diri dari Kabupaten Sorong Selatan pertumbuhan ekonominya melambat dan tidak lagi mampu melampaui *benchmark*.

Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw yang pada tahun 2009 menempati kuadran III, di tahun 2010 tetap tidak beranjak dari posisinya, dan sekarang bertambah dengan masuknya Kabupaten Sorong Selatan. Kelima kabupaten tersebut berada di kuadran ini karena capaian IPM dan pertumbuhan ekonominya masih berada dibawah *benchmark*.

Setelah berhasil melampaui *benchmark* pertumbuhan ekonomi yang melambat, Kabupaten Fakfak menyusul Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong di kuadran I. Pergeseran tersebut membawa Kabupaten Fakfak ke kondisi yang lebih baik, yaitu capaian IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

5.3.2 IPM Terhadap PDRB Per Kapita

Diagram kuadran yang kedua adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan PDRB per kapita. *Benchmark* yang digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat PDRB per kapita Provinsi Papua Barat.

Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (PDRB per kapita) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

Kuadran I : IPM tinggi dan PDRB per kapita tinggi

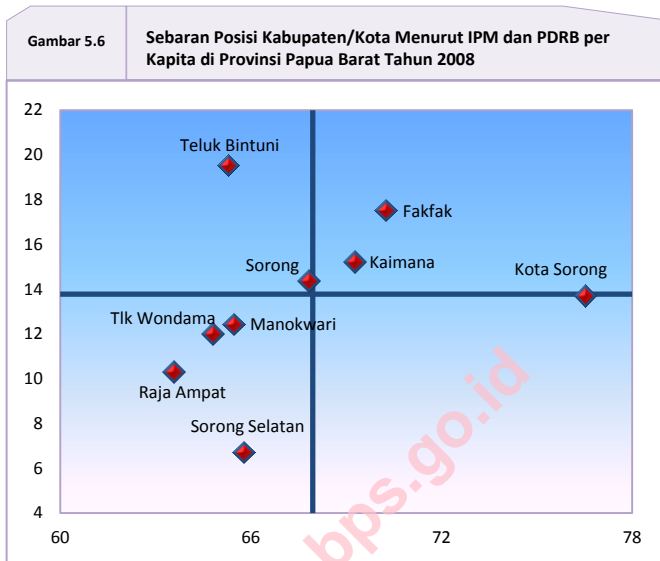
Kuadran II : IPM rendah dan PDRB per kapita tinggi

Kuadran III : IPM rendah dan PDRB per kapita rendah

Kuadran IV : IPM tinggi dan PDRB per kapita rendah

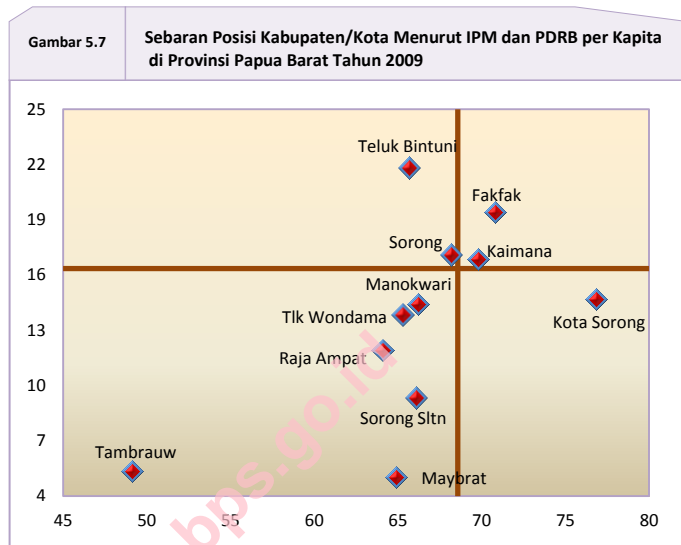
Gambar 5.6 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2008 dan PDRB per kapita tahun 2008. Kuadran I ditempati oleh Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong. Ketiga kabupaten/kota ini mampu melampaui besaran *benchmark* capaian IPM maupun PDRB per kapita, sehingga dapat menempatkan posisi di kuadran I.

Kuadran II hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita yang tinggi tetapi capaian IPM-nya relatif masih rendah, sehingga hanya mampu menempatkan diri pada kuadran II.



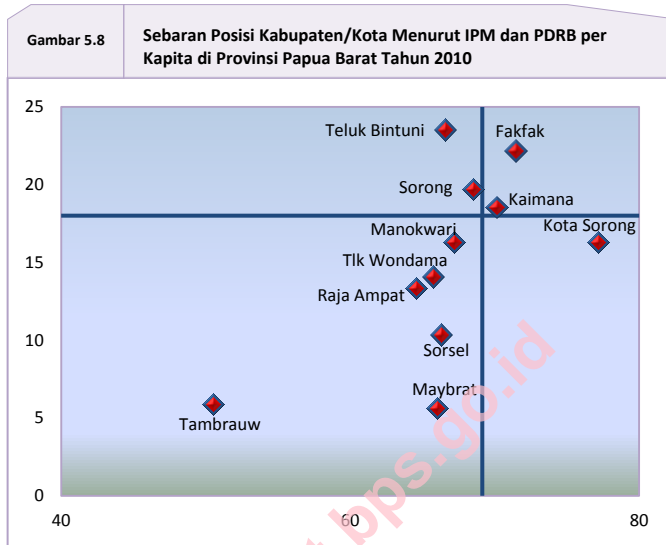
Berbeda dengan kuadran II, di kuadran III ditempati oleh empat Kabupaten, yaitu Manokwari, Teluk Wondama, Raja Ampat dan Sorong Selatan. Ironisnya adalah di kuadran III sebenarnya merupakan kuadran dengan ciri yang terburuk diantara kuadran-kuadran lainnya. Ciri kuadran ini adalah memiliki PDRB per kapita rendah dan capaian IPM yang rendah pula.

Kuadran IV yang memiliki ciri PDRB per kapita rendah dan capaian IPM tinggi tidak ditempati oleh satupun kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat karena tidak ada yang memiliki ciri tersebut. Tidak satupun kabupaten/kota yang berada diatas *benchmark* IPM dan dibawah *benchmark* PDRB per kapita Provinsi Papua Barat. Kota Sorong berpeluang untuk mengalami pergeseran posisi dari kuadran I ke kuadran IV, karena posisinya berhimpit dengan *benchmark* PDRB per kapita.



Sebaran posisi absolut antar kuadran kabupaten/kota tahun 2009 sedikit mengalami perubahan dari kondisi tahun 2008. Perubahan kecil hanya terjadi pada kuadran I dan kuadran IV. Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, Kota Sorong yang berada pada posisi rawan karena berhimpitan dengan *benchmark* pada tahun sebelumnya bergeser ke kuadran IV. Peningkatan nilai *benchmark* PDRB per kapita tidak mampu dilampaui oleh peningkatan PDRB per kapita Kota Sorong. Akibatnya posisi Kota Sorong turun ke kuadran IV yang memiliki ciri capaian IPM tinggi dan PDRB per kapita rendah.

Pergeseran posisi lainnya hanya terjadi di dalam kuadran sebagai konsekuensi atas peningkatan capaian IPM serta peningkatan atau penurunan PDRB per kapita dari masing-masing kabupaten/kota. Peningkatan dan penurunan nilai *benchmark* juga dipengaruhi oleh perkembangan capaian IPM dan PDRB per kapita kabupaten/kota.



Sebaran posisi kabupaten/kota di tahun 2010 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2009. Perubahan posisi hanya terjadi di dalam kuadran. Kuadran I tetap ditempati oleh Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Kuadran II masih diisi oleh Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni. Kuadran III ditempati oleh Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Kabupaten Tamberau. Sedangkan di kuadran IV hanya dihuni oleh Kota Sorong.

Perhatian serius perlu ditujukan pada enam kabupaten yang menempati kuadran III selama dua tahun berturut-turut. Seperti diketahui bahwa kuadran ini memiliki ciri dengan kondisi terburuk, yaitu capaian IPM rendah dan PDRB per kapita rendah. Perkembangan dari sisi pembangunan ekonomi tampaknya yang paling realistis mengingat kabupaten di Papua Barat memiliki sumber daya alam berlimpah yang

dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dilain sisi, pembangunan manusia lebih sulit untuk tumbuh secara drastis karena pembangunan manusia adalah investasi jangka panjang dan tanpa dukungan pembangunan ekonomi yang baik maka proses pembangunan manusia juga akan berjalan sangat lambat.

Sebaran posisi Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat dalam kudran masih berada di kuadran dengan ciri yang terburuk, yaitu di kuadran IV. Baik PDRB per kapita maupun capaian IPM kedua kabupaten ini masih belum mampu melampaui *benchmark*. Dilihat dari posisi *scatter* dalam diagram tampak bahwa kedua kabupaten ini masih tertinggal dari kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat. Diperlukan kerja keras dalam kinerja sektor ekonomi maupun pembangunan manusia untuk dapat mengejar keteringgalan dengan kabupaten/kota lainnya.

5.4 Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

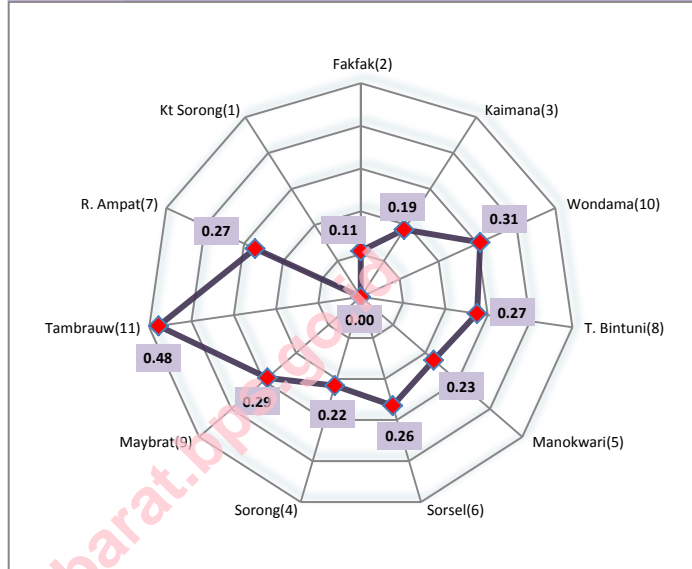
Penghitungan indeks disparitas pembangunan manusia dengan menggunakan Metode Taksonomik menghasilkan dua komponen indeks disparitas, yaitu Pola Pembangunan (*pattern of development*) dan Ukuran Pembangunan (*measure of development*). Kedua ukuran ini saling berkaitan dalam menentukan besaran indeks disparitas pembangunan manusia. Pola pembangunan digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota yang menjadi model, dimana semakin tinggi nilai pola pembangunan yang dimiliki suatu kabupaten/kota mengindikasikan bahwa berbagai karakteristik yang dimiliki kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota yang

digunakan sebagai model/acuan (nilai pola pembangunan kabupaten/kota model sama dengan nol). Sedangkan ukuran pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks disparitas pembangunan manusia suatu kabupaten/kota yang diteliti, jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati 1 (satu) maka peringkat indeks disparitas pembangunan manusia kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota acuan (dimana nilai ukuran pembangunan kabupaten/kota acuan sama dengan nol) atau dengan kata lain kabupaten/kota tersebut semakin tidak berkembang.

Terkait dengan pemilihan kabupaten/kota sebagai acuan, maka dipilih Kota Sorong sebagai acuan dari kabupaten/kota. Alasan pemilihan Kota Sorong menjadi acuan adalah karena Kota Sorong selalu unggul dari semua dimensi dalam komponen penyusun indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Gambar 5.9, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan indeks disparitas berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,48. Dalam gambar terlihat bahwa ukuran pembangunan tersebar dalam lima radius. Pusat radar adalah Kota Sorong sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh posisi kabupaten dari pusat radar maka semakin tertinggal kabupaten tersebut dalam hal pembangunan manusia. Kabupaten terdekat adalah Kabupaten Fakfak yang terletak pada radius kedua dalam radar. Ini menunjukkan meskipun Kabupaten Fakfak berada pada peringkat kedua namun jarak antara ukuran pembangunan dengan Kota Sorong relatif cukup jauh.

Gambar 5.9

Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2010


Jarak kabupaten terjauh dari daerah acuan adalah Kabupaten Tambrau. Kabupaten ini berada pada radius ke-5 dan hampir mendekati radius ke-6. Jauhnya jarak antara Kabupaten Tambrau dengan Kota Sorong sebagai daerah acuan memberikan informasi bahwa Kabupaten Tambrau sangat jauh ketinggalan dalam hal pembangunan manusia dari Kota Sorong yang merupakan peringkat pertama.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Situasi Pembangunan Manusia:

Kesehatan

1. Angka harapan hidup Provinsi Papua Barat dari tahun 2008-2010 cenderung terus mengalami peningkatan.
2. Angka harapan hidup tertinggi di Kota Sorong sebesar 71,95 tahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw sebesar 66,15 tahun.
3. Indeks derajat kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sebesar 72,51.

Pendidikan

1. Angka melek huruf selama periode 2008-2010 terus menunjukkan peningkatan.
2. Peningkatan angka melek huruf terjadi di seluruh kabupaten/kota.
3. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 2008-2010 meningkat dari 7,67 tahun pada tahun 2008 menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009 dan menjadi 8,21 tahun pada tahun 2010. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 2 SMP.

4. Indeks pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sebesar 80,38.

Kemampuan Daya Beli

1. Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2010 adalah sebesar Rp. 596.080,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp 595.280,-.
2. Indeks paritas daya beli tahun 2010 sebesar 54,56.

Gambaran IPM Papua Barat Tahun 2010:

1. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya dari 68,58 menjadi 69,15.
2. Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat disebabkan oleh peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan daya beli.
3. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2010 menempati peringkat 29 dari 33 provinsi di Indonesia atau mengalami peningkatan satu peringkat dibandingkan tahun 2009 yang menempati peringkat 30 dari 33 provinsi.
4. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2010 termasuk dalam kategori menengah atas dengan capaian 69,15 dalam skala 0 – 100.
5. IPM tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2010 diraih oleh Kota Sorong dengan indeks 77,18 dalam skala 0 – 100.
6. IPM terendah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2010 diraih oleh Kabupaten Tambrauw dengan indeks 50,51 dalam skala 0 – 100.

7. Berdasarkan kriteria UNDP, kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok menengah dan kelompok bawah.
8. Kelompok IPM menengah terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat.
9. Kelompok IPM bawah hanya ditempati oleh Kabupaten Tambrau.

<http://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, Aburizal, (2006), “*Mengapa Pembangunan Manusia?*” Kompas, 24 Mei 2006.
- BPS. 2005. *Indikator Statistik Bidang Sosial Menurut Jenis dan Penggunaannya*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- , 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 Buku 2 (Kabupaten)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- , 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , 2008. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , (1996), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 1996*, Jakarta.
- , (2001), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*, Jakarta.
- , (2004), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004*, Jakarta.
- , 2006. *Statistik Pendidikan 2006*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , Bappenas, dan UNDP, (1990), *Laporan Pembangunan Manusia 1990*, Jakarta.
- , 2007. *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*. BPS: Jakarta.

- . 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. BPS: Jakarta.
- . 2009. *Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi*. BPS: Jakarta
- BPS Provinsi Papua Barat, (2010), *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2009*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari
- . (2010), *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2007*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari
- , (2010), *Papua Barat dalam Angka Tahun 2010*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- . 2010. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2010*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- . 2008. *Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- . 2008. *Profil Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- . 2007. *Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- Depdiknas. 2005. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas: Jakarta
- . 2006. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Depdiknas: Jakarta.

----- . 2009. www.depdiknas.go.id

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goal Indonesia 2007*. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

UNDP. 2009. *Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*. United Nation Development programme: New York, USA

<http://papuabarat.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator dan Sumber Data Pendukung yang Digunakan Dalam Penghitungan IPM

Indikator	Sumber Data
(1)	(2)
A. Kesehatan	
1. Angka Harapan Hidup	Susenas 2008-2010
2. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	Susenas 2008-2010
3. Angka Kematian Bayi	Susenas 2008-2010
4. Penolong Kelahiran	Susenas 2008-2010
5. Persentase Balita yang Diimunisasi	Susenas 2008-2010
6. Jumlah Tenaga Kesehatan	Dinkes Papua barat 2010
7. Jumlah Sarana Kesehatan	Dinkes Papua barat 2010
8. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum	Susenas 2008-2010
9. Persentase Penggunaan fasilitas Tempat Buang Air	Susenas 2008-2010
B. Pendidikan	
1. Angka Melek Huruf	Susenas 2008-2010
2. Rata-rata Lama Sekolah	Susenas 2008-2010
3. Angka Partisipasi Sekolah	Susenas 2008-2010
4. Tingkat Pendidikan	Susenas 2008-2010
5. Angka Putus Sekolah	Kemendiknas 2010
6. Rasio-rasio Pendidikan	Kemendiknas 2010
7. Tingkat Kelulusan Siswa	Kemendiknas 2010
C. Perekonomian	
1. PDRB ADHB dan ADHK	PDRB 2010
2. PDRB per Kapita	PDRB 2010
3. Pertumbuhan Ekonomi	PDRB 2010
4. Struktur Ekonomi	PDRB 2010

Lampiran 2. Konversi Tingkat Pendidikan Menjadi Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Lama Sekolah
Tidak/Belum tamat SD	0
Tamat SD/Sederajat	6
Tamat SMP/Sederajat	9
Tamat SMA/Sederajat	12
Tamat Diploma I	13
Tamat Diploma II	14
Tamat Diploma III	15
Tamat Sarjana/Diploma IV	16
Tamat S2	18
Tamat S3	21

Lampiran 3. Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli

No	Variabel	Karakteristik	Skor
1	Jenis lantai	Keramik, Marmer, atau Granit	1
		Lainnya	0
2	Luas lantai per kapita	Lebih dari 10 m ²	1
		Lainnya	0
3	Jenis dinding terluas	Tembok	1
		Lainnya	0
4	Jenis atap terluas	Beton/Kayu/Genteng	1
		Lainnya	0
5	Fasilitas penerangan	Listrik	1
		Lainnya	0
6	Fasilitas air minum	Ledeng	1
		Lainnya	0
7	Fasilitas jamban	Milik sendiri	1
		Lainnya	0
8	Skor awal setiap rumah	Rumah	1
		Lainnya	0

Lampiran 4. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

No	Komoditi	Unit	Proporsi dari Total Konsumsi (%)
1	Beras Lokal	Kg	7,25
2	Tepung Terigu	Kg	0,10
3	Singkong	Kg	0,22
4	Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5	Teri	Ons	0,32
6	Daging Sapi	Kg	0,78
7	Ayam	Kg	0,65
8	Telur	butir	1,48
9	Susu Kental Manis	397 gram	0,48
10	Bayam	Kg	0,30
11	Kacang Panjang	Kg	0,32
12	Kacang Tanah	Kg	0,22
13	Tempe	Kg	0,79
14	Jeruk	Kg	0,39
15	Pepaya	Kg	0,18
16	Kelapa	butir	0,56
17	Gula	Ons	1,61
18	Kopi	Ons	0,60
19	Garam	Ons	0,15
20	Merica	Ons	0,13
21	Mie Instan	80 gram	0,79
22	Rokok Kretek	10 batang	2,86
23	Listrik	Kwh	2,06
24	Air Minum	M ³	0,46
25	Bensin	liter	1,02
26	Minyak Tanah	liter	1,74
27	Sewa rumah	unit	11,56
Total			37,52

Lampiran 5. Rata-rata Jumlah Hari Sakit pada Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun 2010.

Kabupaten/kota	Lama hari sakit (hari)				Total
	<= 3	4 - 7	8 - 14	> 15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	41.23	36.87	9.12	12.8	100.00
Kab. Kaimana	64.37	31.99	1.48	2.16	100.00
Kab. Teluk Wondama	64.63	22.27	5.68	7.42	100.00
Kab. Teluk Bintuni	64.05	28.45	4.54	2.95	100.00
Kab. Manokwari	48.96	42.26	2.12	6.66	100.00
Kab. Sorong Selatan	59.93	29.39	3.62	7.05	100.00
Kab. Sorong	45.76	38.98	4.52	10.7	100.00
Kab. Raja Ampat	51.23	42.36	3.45	2.95	100.00
Kab. Tambrauw	66.82	28.44	2.03	2.71	100.00
Kab. Maybrat	56.76	35.14	5.41	2.7	100.00
Kota Sorong	49.19	40.32	6.99	3.5	100.00
Prov. Papua Barat	52.11	37.68	4.76	5.44	100.00

Lampiran 6. Persentase Cara Pengobatan yang Dilakukan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kab./Kota di Prov Papua Barat 2010.

Kabupaten/Kota	Pengobatan Sendiri	Pengobatan ke Sarana Kes	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Fakfak	70.87	29.13	100,00
Kab. Kaimana	61.44	38.56	100,00
Kab. Teluk Wondama	65.29	34.71	100,00
Kab. Teluk Bintuni	41.09	58.91	100,00
Kab. Manokwari	60.90	39.10	100,00
Kab. Sorong Selatan	60.66	39.34	100,00
Kab. Sorong	63.95	36.05	100,00
Kab. Raja Ampat	75.88	24.12	100,00
Kab. Tambrauw	89.62	10.38	100,00
Kab. Maybrat	59.46	40.54	100,00
Kota Sorong	69.94	30.06	100,00
Prov. Papua Barat	63.83	36.17	100,00

Lampiran 7. Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli Penghitungan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun 2010.

Kabupaten/kota	Indek Kesehatan			Indeks Pendidikan			Indeks Daya Beli		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
Fakfak	74.68	75.27	75.87	84.62	84.99	85.57	51.42	52.14	52.94
Kaimana	73.77	74.14	74.42	79.43	79.93	80.44	54.62	55.32	55.53
Teluk Wondama	70.00	70.42	70.84	69.43	69.74	70.73	54.92	55.65	55.69
Teluk Bintuni	70.92	71.47	72.02	70.34	70.60	72.61	54.61	54.88	55.11
Manokwari	70.63	71.11	71.66	73.78	74.78	77.13	51.97	52.72	52.76
Sorong Selatan	68.88	69.15	69.43	76.27	76.44	76.62	52.16	52.67	52.89
Sorong	70.20	70.81	71.42	78.70	78.79	79.04	54.56	54.87	55.04
Raja Ampat	67.38	67.92	68.62	77.35	77.98	78.74	45.96	46.33	46.38
Tambrau	-	68.48	68.58	-	60.28	64.20	-	18.61	18.75
Maybrat	-	68.38	68.88	-	75.24	77.78	-	51.06	51.33
Sorong	76.87	77.55	78.25	89.44	89.50	89.63	63.27	63.47	63.66
Papua Barat	71.50	72.00	72.51	78.48	79.36	80.38	53.88	54.37	54.56

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://papuabarat.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315

Telp. 0986.214199 Fax. 0986.214199

E-mail : bps9100@bps.go.id

Homepage : www.irjabar.bps.go.id

